PENGARUH KOMPETENSI PERANGKAT DESA DAN TRANSPARANSI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESADI KOTA PAYAKUMBUH

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada program studi Akuntansi Syariah



Oleh :

RESKI RAMADHANI
NIM: 3419070

JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK

BUKITTINGGI

TAHUN 2023 M/ 1445H

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa dan Transparansi Terhadap Akuntabiltas Pengelolaan Dana Desa Di Kota Payakumbuh**, ditulis oleh **Reski Ramadhani** NIM : **3419070** Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Di Kota Payakumbuh masih banyak perangkat kelurahan yang memiliki latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan jabatannya. Bahkan bendahara yang ada dikelurahan tigo koto dibaruah berbeda setiap kegiatan hal ini akan menyulitkan jika tidak memiliki latar belakang pendidikan yang tepat. Selain itu, aparatur kelurahan masih belum terbuka dalam pengelolaan dana kelurahan hal ini dikarena kan kurangnya keterlibatan masyrakat dalm rapat-rapat yang dilakukan untuk kesejateraan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara kompetensi perangkat desa, dan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Populasi dalam penelitian ini adalah salah satu dari perangkat desa yang ada di Kota Payakumbuh yang berjumlah sebanyak 47 kelurahan. Sampel dalam penelitian ini juga berjumlah 47 perangkat desa dengan teknik quota sampling. Metode pengumpulan data yaitu kuesioner. Metode analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pernyataan tersebut didasarkan pada hasil uji Parsial (Uji T) dengan nilai signifikansi sebesar 0,020 yang mana < 0,05 dan dilihat dari nilai t hitung 2,409 > t tabel 2,011. Transparansi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pernyataan tersebut didasarkan pada hasil uji parsial (uji T) dengan nilai signifikansi sebesar 0,708 yang mana > 0,05 dan dilihat dari nilai t hitung 0,377 < tabel 2,011. Kompetensi Perangkat desa dan transparansi secara bersama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pernyataan tersebut didasarkan pada hasil uji simultan (Uji F) dengan nilai signifikansi 0,028 < 0,05 dan dilihat dari F hitung > F tabel yaitu sebesar 3,90 > 3,20.

Kata Kunci: Kompetensi, Transparansi, Akuntabilitas, Dana Desa

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, pui syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kota Payakumbuh". Demi menyelesaikan studi Jurusan Akuntanasi Syariah untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi Syariah. Shalawat dan salam, penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah meninggalkan dua perkara yang tak kan sesat apabila kita berpegang teguh kepada keduanya yakni Al-Quran dan Hadist.

Penulisan skripsi ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk penulis lakukan. Adan banyak halangan yang mesti dilalui terkadang meminta hati untuk mengakhirnya, tetapi orang-orang luar biasa telah menguatkan diri ini unruk mampu menghadang segalanya. Penghargaan dan cinta terbesaar penulis tunjukkan kepada ayahanda **Alm. Darmon**dan ibunda **Marhenis** yang telah memberikan segenap cinta dan kekuatan yang tiada tara dalam mengasuh, membesarkan serta mendidik penulis yang merupakan lautan budi yang tak terbatas dan memberikan motivasi dalam perjalanan hidup dan cita-cita penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kakak penulis **Riska Darmelia** memberi semangat untuk menyelesaikan pendidikan di UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

Penulisan skripsi ini juga tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan serta bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, izinkan penulis mengucapkan rasa syukur kepada orang-orang yang telah berjasa dalam penyelesaikan skripsi diantaranya:

1. Ibu Rektor **Prof. Dr.Ridha Ahida, M.Hum** selaku Rektor di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

2. Bapak **Dr. Asyari, S.Ag. M.Si** selaku wakil rektor I, ibu **Dr. Zulfani Sesmiami, M.pd** selaku wakil rektor II dan bapak **Dr. Arman Husni, Lc.,MA** selaku wakil rektor III UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi
3. Ibu **Dr. Hesi Eka Putri, S.E., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
4. Ibu **Dr. Rusyaida M. Ag** selaku wakil dekan I, bapak **Gusril Basir S.H, M. Hum** selaku wakil dekan II, dan bapak **Dr. Andriyaldi, MA** selaku wakil dekan III.
5. Ibu **Ariyun Anisah, SE, ME**selaku ketua prodi Akuntansi Syariah yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menambah ilmu pengetahuan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
6. Ibu **Novera Martilova, SE, ME** selaku pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini, terima kasih atas bimbingan dan arahan yang telah ibuk berikan selama penulis menyelesaikan skripsi.
7. Ibu **Era Sonita**selaku penasehat akademik yang telah memberikan nasehat dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
8. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan/ti UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan di perguruan tinggi ini.
9. Pimpinan serta karyawan/ti perpustakaan UIN Sjech M. Djambil Djambek Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Perangkat Kelurahan yang ada di Kota Payakumbuh,
11. Teman-teman jurusan Akuntansi Syariah angkatan 2019 yang telah menjadi teman seperjuangan kuliah yang memberikan semangat disaat keputusasaan dan yang merasakan senang saat kesenangan menerpa penulis serta senior, junior dan sahabat yang selalu memberikan dorongan bagi penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya dan khususnya keluarga besar Akuntanasi Syariah, terima kasih atas selama ini

yang banyak memberikan semangat bagi penulis. Semoga dapat meraih cita-citanya sehingga dapat mewujudkan impian untuk membahagiakan orangtua.

12. Semua pihak yang telah membantu penulis selama menyelesaikan studi di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittingi.

Atas segala bantuan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.Semoga amalan dan jasa baik yang telah diberikan mendapat balasan yang lebih baik pula dan pahala di sisi Allah SWT, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.Dengan segala kerendahan hati, penulis sajikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan harapan bisa bermanfaat bagi kita semua.

Bukittinggi, Juli 2023
Penulis

Reski Ramadhani
NIM: 3419070

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa berdasarkan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten atau kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa.

Hal ini menunjukan bahwa setiap desa memiliki hak dan kesempatan untuk mengatur dan mengelola keuangan desa secara mandiri, serta dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh desa, melakukan inovasi dan kreasi sesuai dengan kebutuhan desa, dan mengurus urusan desa dan kebutuhan desa sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat desa[1].

Secara hirarkis, diakui atau tidak, masyarakat desa mempunyai perbedaan yang sangat jauh dengan masyarakat perkotaan.Konsep pembangunan diperdesaan jauh lebih rumit dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Aspek pelayanan publik masih membutuhkan pemikiran penting dalam menyusun strategis program perdesaan.

[1]Hayat, Daris Zunaida, Kemandirian Desa. (Malang:CV. Cita Intrans Selaras,2018), hlm 5

Sumber daya manusia harus disiapkan secara matang dan kompetitif dalam bidang pelayanan, dan berbagai kebutuhan yang optimal bagi pemerintah desa untuk melakukan berbagai perubahan dan terobosan dalam pembangunan yang berkelanjutan.Termasuk didalamnya adalah pembangunan kapasitas dalam pelayanan publik untuk untuk mendorong pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang prima dan berkualitas, serta meningkatkan kompetensi dan akuntabilitas aparatur yang bersih dan bebas dari KKN.

Reformasi birokrasi pada pemerintahan desa sejatinya harus dilakukan sejak dini, hal ini penting untuk mengukur sejauhmana implementasi pemerintahan desa dalam kerangka UU 6/2014 dan UU 5/2014 tentang aparatur negara, sejak dari rekrutmen hingga pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur.Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi aparatur dalam bidang pemberian layanan kepada masyarakat.

Pelayanan publik yang diharapkan oleh masyarakat hanyalah sebuah pelayanan yang baik, murah, dan mudah. Ketiga aspek pelayanan ini menjadi prioritas dalam pemberian layanan pada organisasi pemerintahan, niscaya harapan dan keinginan masyarakat akan kebutuhannya dapat dirasakan secara maksimal. Untuk meningkatkan pelayanan publik bagi pemerintah desa, reformasi desa menjadi jalan utama yang berpedoman pada UU aparatur sipil negara dalam melakukan implementasi kebijakannya.

Aspek kompetensi dalam UU No. 5 Tahun 2014 menjadi titik penting dalam perekrutan aparatur negara, baik bagi PNS maupun PTT.Namun demikian, aspek kinerja yang berkualitas juga menjadi kunci keberhasilan aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan bagi masyarakat.

Pemerintah desa sudah harus menyiapkan konsep pemerintahan yang inovatif dalam membangun kapasitas pemerintahannya, bangunan sistem pemerintahan harus dikuatkan pada aspek sumber daya manusia.Pembangunan sumber daya manusia menjadi subyek yang paling mendasar yang harus diperhatikan oleh pemimpin dalam menjalankan organisasi.Sebaik-baiknya infrastruktur dan sistem tata kelola yang baik, jika tidak didukung oleh sumber daya aparatur yang berkualitas, maka pembangunan dan kebijakan pemimpin sulit tercapai dengan baik.

Penata kelolaan sebuah organisasi harus dimulai dari tata kelola manusianya. Sumber daya manusia yang berkualitas akan menjamin terlaksananya setiap kebijakan yang dilakukan,begitu pula infrastruktur akan terbangun berdasarkan kebutuhan dan kemanfaatan bagi masyarakat serta sistem yang baik dapat tercapai dengan baik.[2]

Pengelolaan keuangan desa secara mandiri dan pengembangan potensi desa dikatakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan dana desa yang baik, akan terlihat dari pembangunan desa yang dilakukan, pertumbuhan ekonomi dan kemaslahatan bagi masyarakat

[2]Kemandirian Desa , hlm 12-13

desa. Desa yang sejahtera, makmur, dan mandiri adalah harapan bersama sebagai pilar dari pembangunan nasional.Pengelolaan keuangan desa tidak dapat dipisahkan dari akuntabilitas.

Menurut Roberts dan Scapes seperti yang dikutip oleh Sinclairmengatakan bahwa akuntabilitas mensyaratkan sebuah hubungan dimana seseorang diminta untuk menjelaskan dan mengambil tanggungjawab terhadap tindakan mereka. Sinclair mengatakan bahwa bagaimana akuntabilitas tersebut didefinisikan akan tergantung pada ideologi, motif dan bahasa aman kita.

Sinclair mengatakan bahwa akuntabilitas memiliki disiplin makna khusus dan dapatkan didefinisikan dari berbagai perspektif. Definisi yang dikemukakan oleh Sinclair terkait dengan akuntabilitas dibagi menjadi lima bentuk, yaitu akuntabilitas politik, akuntabilitas public, akuntabilitas manajerial,akuntabilitas professional, dan akuntabilitas personal.[3]

Menurut Mustofa dalam Wardana, akuntabilitas merupakan suatu bentuk kewajiban yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan suatu pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik. Akuntabilitas dalam pemerintahan desa merupakan hal yang sangat penting karena merupakan media pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengelola dana desa.

[3]Sinclair. The Chameleon of Accountability : Forms and Disources. 1995.

Kompetensi perangkat desa menurutWibowo bahwa suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut, sedangkan kompetensi perangat desa adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh perangkat desa untuk melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintah desa untuk melakukan tata kelola di kelurahan dalam melakukan pembangunan yang ada sehingga masyarakat sejahtera.

Berdasarkan data yang didapatkan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Payakumbuh Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan terkait data program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Tabel 1.1Dana Pelaksanaan Pembangunan Bidang Sekretariat

Keterangan	2020	2021	2022
Program Penunjang Urusan Pemda Kab/Kota	946.038.824	3.614.683.429	3.872.989.582

Sumber: Data Dokumentasi

Keberhasilan pengelolaan dana desa sangat dipengaruhi oleh bagaimana cara pemimpinnya dalam mengelola suatu dana yang diberikan. Dalam hal ini kompetensi dari aparatur pemerintah desa memiliki peranan yang sangat penting agar dana desa mampu terserap dengan baik khususnya kompetensi dari kepala desa itu sendiri.

Di Kota Payakumbuh masih banyak perangkat kelurahan yang memiliki latar belakangpendidikan yang tidak sesuai dengan jabatan nya.

Bahkan bendahara yang ada dikelurahan tigo koto dibaruah berbeda setiap kegiatan hal ini akan menyulitkan jika tidak memiliki latar belakang pendidikan yang tepat. Berpedoman dengan program Nawa Cita ke-3 yaitu akan membangun Indonesia dimulai dari daerah pinggiran dengan memperkuat desa sehingga diperlukan pengelolaan yang baik dari pemerintah desa dengan dukungan aparatur desa yang berkualitas serta berkompeten dibidangnya, khususnya kepala kelurahan.

Tabel 1.2 Data Pendidikan Perangkat Kelurahan

Nama	Jabatan	Pendidikan
Netra, S.Sos	Lurah	S1
Susilawati. A. S,ST.Ars	Sekretaris	S1
Roki Yunandi, S.Sos	Kasi Pemerintahan dan Trantibum	S1
Safitri Yeni,S.Ap	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	S1
Nuri Fatma,SKM	Kasi Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Pembangunan	S1

Sumber : Data Dokumentasi, Struktur Kelurahan Tigo Koto Dibaruah

Kepala kelurahan sebagai orang yang bertanggungjawab di kelurahan harus memiliki pengetahuan serta pengalaman yang baik untuk bidangnya.Namun, seperti yang dikatahui dengan kepala lurah yang bergelar sarjana sosial apakah mampu mengelola keuangan dengan baik. Selain itu permasalahan lainnya masih banyak para aparatur kelurahan yang masih gaptek akan teknologi contoh nya dalam pengoperasian komputer kadang butuh waktu yang lama untuk mengurus surat jika tidak ada format surat yang akan digunakan, hal ini menjadi permasalahan yang

cukup serius karena dengan teknologi yang ada pada zaman sekarang, seharusnya para aparatur kelurahan lebih mengupgrade skill agar hal seperti itu dapat diminimalisir. Dengan demikian, perangkat kelurahan harus memiliki keilmuan dan kemampuan yang memadai dibidangnya serta mampu menghadapi dan mengupgrade diri jika ada pembaharuan didalam bidang nya agar kelurahan nya tidak ketinggalan dalam pengelolaan keuangan dan teknologi untuk kemandirian kelurahan serta perkembangan kelurahan yang maju.

Krina, menjelaskan bahwa transparansi merupakan prinsip yang menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, yang terdiri dari informasi tentang kebijakan, dan proses pembuatan serta hasil yang dicapai. Untuk itu, setiap organisasi harus memberikan akses informasi kepada seluruh pemangku kepentingan, baik itu kepada masyarakat, media, kelompok kepentingan serta pihak terkait lainnya sebagai salah satu wujud penerapan prinsip transparansi.[4] Namun, yang terjadi dikelurahan- kelurahan khususnya Keluarahan Tigo Koto Dibaruah yaitu alokasi dana yang seharusnya digunakan untuk fasilitas yang seharusnya bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat serta dapat menambah pendapatan eonomi masyarakat sekitar akan tetapi dana tersebut dialokasikan untuk fasilitas yang kurang bermanfaat bagi masyarakat karena fasiltas yang telah dibuat tidak memiliki efek jangka panjang yang disebabkan tidak optimalnya

[4]Loina Lalolo Krina, Indikator dan alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi. Sekretariat Good Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2003

pengalokasian yang terjadi yang tidak melibatkan masyarakat sehingga masyarakat juga tidak ikut campur tangan dalam pembangunan faslitas tersebut. Contohnya, pengalokasian dana untuk tiang sampah dibeberapa pusat dikelurahan, hal ini kurang optimal pengalokasian nya karena memiliki banyak dampak yang buruk bagi lingkungan disebabkan oleh tidak teraturnya penjemputan sampah-sampah nya sehingga sampah yang ada pada tiang tersebut menumpuk dan membusuk selain itu, pada awalnya program tersebut sudah ada dipemerintah kota, yang menjemput sampah-sampah masyarakat dengan truk setiap hari dengan demikian pengalokasian dana kelurahan untuk hal ini kurang efektif. Sebaiknya, dana desa dialokasikan untuk hal yang lebih produktif seperti pusat jajanan disekitar lapangan bola yang terbengkalai agar sarana tersebut dapat bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat dan bisa menambah kas desa. Selain itu, lapangan bola yang terbengkalai dekat dengan sekolah dan kantor lurah sendiri hal ini seharus nya bisa lebih diperhatikan lebih oleh aparatur kelurahan.

Masalah-masalah diatas dapat terjadi karena kurangnya keterlibatan masyarakat dalam rapat-rapat yang dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri.Selain itu, tidak ada nya akses masyarakat untuk melihat langsung bentuk laporan keuangan dari kelurahan sehingga hal ini sudah termasuk contoh dari tidak transparan nya kelurahan kepada masyarakat yang juga akan mengakibatkan

masyarakat menjadi kurang percaya terhadap kelurahan nya masing-masing.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 juga menyatakan jika segala kegiatan yang berhubungan dengan desa terutama pembangunan serta pemeberdayaan masyarakat sangat penting adanya keterlibatan masyarakat sebagai bentuk pengakuan terhadap otonomi asli desa. Untuk mencapai pengoptimalan dalam pengelolaan dana desa serta agar dana desa yang diberikan tepat sasaran, maka masyarakat desa seharusnya benar-benar diajak untuk terlibat langsung secara aktif dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa, sehingga akan banyak pihak yang ikut mengontrol dan dapat meminimkan kesalahan yang mungkin terjadi.

Dikarenakan masalah-masalah yang terjadi diatas maka dibutuhkan nya pertanggungjawaban dari pemerintah desa/kelurahan terhadap pengelolaan dana desa tersebut. Banyaknya kasus ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya dilakukan dengan kenyataan yang dilakukan mengenai pertanggung jawaban dana desa, oleh karena itu, judul dalam penelitian ini adalah **"PENGARUH KOMPETENSI PERANGKAT DESA DAN TRANSPARANSI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KOTA PAYAKUMBUH".**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat di simpulkan identifikasi masalah nya sebagai berikut:

1. Kompetensi perangkat desa terhadap pengelolaan dana desa yang masih rendah.
2. Kemampuan perangkat desa dalam pemanfaatan teknologi dan informasi yang masih rendah.
3. Pemerintah desa masih kurang melibatkan masyarakat dalam rapat-rapat penentuan proyek pembangunan yang menggunakan dana desa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut dapat dirumuskan masalah nya sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dikota payakumbuh?
2. Seberapa besar pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kota payakumbuh?
3. Seberapa besar pengaruh kompetensi perangkat desa dan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kota payakumbuh?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kota Payakumbuh
2. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kota Payakumbuh
3. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh kompetensi perangkat desa dan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kota Payakumbuh

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Manfaat teoritis penelitian ini adalah bertambahnya wawasan keilmuan atau pengetahuan akan pentingnya kompetensi perangkat desa dan aksebilitas terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi pemerintah desa

      Agar pengelolaan dana desa menjadi lebih baik, sehingga terhindar dari penyelewengan atau penyalahgunaan dana desa sehingga pemerintah dapat mengantisipasi bahwa jika ada kendala yang terjadi tidak disengaja dapat teratasi.

b. Bagi pembaca

Agar lebih siap dan memiliki kompetensi yang tinggi untuk menjadi pihak yang ikut serta dalam pengelolaan dana desa. Serta memiliki pengetahuan bahwa pengelolaan dana desa sangat penting tidak hanya bagi pihak yang terlibat langsung namun juga bagi masyarakat.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

1. Definisi Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen secara etimologi pengelolaan berasal dari kata "kelola" *(to manage)* dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. Meskipun bayak ahli yang memberikan pengertian tentang pengelolaan yang berbeda-beda, namun pada prinsipnya memiliki maksud dan tujuan yang sama. Sebagaimana Prajudi, mengatakan baha pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencana diperlukan untuk penyesuaian suatu tujuan kerja tertentu. Menurut Balderton, mengemukakan bahwa istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.[5]

Pengelolaan dalam islam adalah sebagai ilmu sekaligus teknik (seni) kepemimpinan. Hal ini manajemen dalam arti mengatur sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat,dan terarah.

[5]Raharjo Adisasmita, Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah (Yogyakarta: Graha Ilmu:2011) hlm 21

Manajemen yang tepat merupakan watak yang melekat dalam hidup.Manajemen dipandang sebagai perwujudan amal saleh yang harus bertitik tolak dari niat baik. Niat bai tersebut akan memunculkan motivasi untuk mencapai hasil yang baik demi kesejahteraan bersama. Paling tidak ada empat landasan untuk untuk mngembangkan manajemen menurut pandangan islam yaitu, kebenaran, kejujuran, keterbukaan, keahlian[6]. Manajemen syariah memandang bahwa tugas merupakan amanah dan tanggung jawab pribadi yang harus ditunaikan sebagaimana mestinya. Firman Allah SWT QS An- Nisa' 58 :

۞إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".

Pemikiran manajemen dalam islam bersumber dari nash-nash Al-Quran dan petunjuk-petunjuk Al-Sunnah, seperti Firman Allah QS Ar-Ra'd 11:

ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوۡمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمۡۗ ١١

"Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendri"

[6]Abdul Aziz, Manajemen Investasi Syariah,(Bandung : Alfabeta, 2010) hlm 21

Ayat diatas memerintahkan agar berusaha merubah keadaan sebab Allah tidak akan merunah keadaan seseorang jika bukan mereka sendiri yang mengubahnya. Seperti hal nya menjadi seorang pemimpin sebelum membuat keputusan harus membuat perencanaan secermat mungkin serta harus mengarahkan bawahannnya kepada hal yang lebih baik untuk keberlangsungan kegiatan dimasa yang akan datang.

Dana desa merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota (PP No. 7 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 11). Alokasi Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional. Dalam pengelolaan keuangan desa, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan adalah Kepala Desa.[7]

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang

[7]Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Kebijakan Umum Dana Desa. 2015 (Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 dan PP No.60 Tahun 2014).

meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Proses pengelolaan keuangan desa diatur juga dalam permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan, dan pertanggungjawaban. [8]

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan segala dan aktivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban terebut. Akuntabilitas bukan hanya dilakukan secara vertikal, pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja kepada pemerintah daerah, tetapi juga dilakukan secara horizontal, dimana pertanggungjawaban dilakukan kepada masyarakat yang lebih luas.[9]

Akuntabilitas yang baik hanya benar-benar tercapai apabila akuntansi dan para akuntan itu sendiri diikat oleh "seperangkat aturan" yang mempunyai nilai lebih dari sekedar seperangkat aturan ciptaan manusia itulah yang dapat ditemukan dalam islam

[8]Raharjo Adisasmita, Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006)

[9]Mardiasmo.*Akuntansi Sektor Pablik.*(Yogyakarta: CV Andi Offset. 2009)

sebagai wahyu ilahi, akuntabilitas tersebut yang sesuai dengan "ketetapan islam". Akuntansi syariah memandang bahwa akuntabilitas dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Hal inilah yang menjadikan perbedaan besar dengan tujuan dasar akuntansi konvensional. Akuntansi Syariah melihat bahwa akuntansi bisa benar-benar berfungsi sebagai alat "penghubung" anatar stakeholder, entity, dan publik tetap berpegangan pada nilai-nilai akuntansi dan ibadah syariah.

Defenisi lain menyebutkan akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban kepada Tuhan berkaitan dengan sifat amanah. Amanah merupakan perilaku yang wajib dimiliki oleh insane kehidupan perilaku ini juga merupakan pengajaran tertinggi didalam islam. Amanah dalam konteks praktek akuntansi, diinterpretasikan sebagai akuntabilitas, dalam pengertian bahwa orang-orang yang memegang amanah harus bertanggungjawab kepada pemegang saham, pelaksana, masyarakat dan Tuhan. Allah SWT berfirman dalam QS Al-Anfal 27 :

يَٰٓأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَٰنَٰتِكُمۡ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٢٧

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

Ayat diatas menjelaskan bahwa tanggungjawab manusia bukan hanya kepada orang yang memberikan amanah tetapi yang terpenting adalah manusia bertanggungjawab kepada Allah dan Rasul-Nya. Manusia perlu menyadari akan yanggungjawabnya sebagai khalifah dimuka bumi ini. Selain nilai amanah, akuntabilitas spiritual juga merefleksikan nilai professional dan nilai transparan.Nilai profesinal tampak dalam kepribadian karyawan yang memiliki sifat konsisten, percaya diri, dan tidak mudah menyerah dalam menjalankan tugas.Nilai transparan tampak dalam sifat jujur dan dapat dipercaya ketika mengemban tugas amanah.Pengukuran keberhasilan akuntabilitas spiritual dapat dilihat dengan peningkatan ketaqwaan seseorang. Namun nilai-nilai ini bersifat abstrak dan hanya Allah SWT yang bisa menyatakan bahwa seseorang itu lebih bertaqwa dari orang lain.

Berdasarkan pengertian Pengelolaan, Dana Desa, Pengelolaan Dana Desa dan Akuntabilitas, maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa atas kegiatan pengelolaan dana desa yang telah dilakukan pada waktu berjalan, dan memiliki sifat-sifat yang baik dalam mengemban tugas nya dan bertanggungjawab juga kepada Allah

SWT dalam bentuk suatu media pertanggungjawaban yang dapat diketahui oleh semua pihak dalam masyarakat.

2. Dimensi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sedangkan menurut Syahrudin Rasul, dimensi akuntabilitas ada lima, yaitu:

a. Akuntabilitas Hukum dan Akuntabilitas Kejujuran

Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkandalam organisasi. Sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi.Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.

b. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja, yaitu pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

c. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus

mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program itu selesai.

d. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan berarti bahwa lembaga-lembaga publik hendaknya dapatmempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan, harus dipertimbangkan apa tujuan dari kebijakan tersebut, dan mengapa kebijakan tersebut dilakukan.

e. Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas finansial merupakan suatu pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efektif dan efisien, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitasini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membeuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi pada pihak luar[10]

3. Asas Pengelolaan Dana Desa

Menurut Pasal 2 (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 : Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan,

[10]Syahrudin Rasul, Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Dan Anggaran, (Jakarta : Detail Rekod. 2002)hlm 11

akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

a. Transparan

Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Akuntabel

Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawaban pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Partisipatif

Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

d. Tertib dan disiplin anggaran

Yaitu pengelolaan keuangan desa yang harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Upaya untuk mewujudkan disiplin anggaran maka dalam Pengelolaan Keuangan Desa, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
2) Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APB Desa/Perubahan APB Desa.
3) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus

dimasukkan dalam APB Desa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa. [11]

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Baiq, Thatok, mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu:

1) Kompetensi perangkat desa

Dalam hal kompetensi perangkat desa Rudana, menjelaskan bahwa kompetensi merujuk kepada pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skill*), dan kemampuan (*abilities*), yang dapat didemonstrasikan yang dilakukan dengan standar tertentu.[12]

2) Penggunaan aplikasi siskeudes

Untuk mendukung kegiatan pengelolaan kas desa yang cukup besar, pemerintah khususnya pihak BPKP membuat aplikasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.Aplikasi yang dimaksud adalah aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes).Penggunaan sistem informasi aplikasi siskeudes sangat berdampak baik terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, disebabkan karena aplikasi

[11]UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa

[12] Rudana Nyoman, Pengaruh kompetensi dan komunikasi interpersonal terhadap kualitas pelayanan publik. (Jakarta : STIA LAN. 2005)

siskeudes relative mudah digunakan dan mengakomodir kebutuhan penatausahaan keuangan desa.

3) Kepatuhan pajak bendaharawan desa

Kegiatan pembangunan infrastruktur desa yang dibiayai dana desa akan menimbulkan beban pajak berupa pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Salah satu kontribusi pajak adalah membiayai pengeluaran pemerintah pusat berupa dana transfer ke daerah sampai ke desa. Dana transfer ke daerah dan desa ini selanjutnya dipergunakan untuk membiayai pembangunan fisik dan non fisik didaerah sampai kedesa. Melihat peran dan kontribusi pajak begitu penting bagi pembangunan Indonesia maka wajar pemerintah dalam hal ini (DJP) terus berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan tersebut.

4) Partisipasi masyarakat

Menurut Isbandi, keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan keterlibatan

masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. [13]

Sedangkan menurut Marita, Fitriyani, Windyastuti dan Nurahman (2018), faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu:

1) Transparansi

Transparansi menurut Mardiasmo, berarti keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas dan wewenang, ketersediaan informasi kepada publik proses penganggaran yang terbuka dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fiscal, informasi dan penjabarannya.[14]

2) Peran Perangkat Desa

Kepala desa dan perangkat desa merupakan orang yang memiliki peran penting dalam memimpin dan mengelola desa untuk mencapai cita-cita bersama dalam upaya mengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakatnya serta memanfaatkan sumber daya yang dimiliki melalui

[13]Isbandi Adi Rukminto, Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada. 2007) hlm 27

[14]Mardiasmo.*Akuntansi Sektor Pablik.*(Yogyakarta: CV Andi Offset. 2009)

penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan masalah dan kebutuhan masyarakat desa.Oleh karena itu, peran perangkat desa sangat mempengaruhi keberhasilan pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan program pemerintahan desa.Pemerintah desa merupakan bagian dari unsur pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa dibawah naungan kepala desa.

B. Kompetensi Perangkat Desa

1. Definisi Kompetensi Perangkat Desa

Kompetensi menurut Dessler adalah karakteristik pribadi yang dapat ditunjukkan seperti pengetahuan, keterampilan, dan prilaku pribadi seperti kepemimpinan.Wibowo mengemukakan bahwa suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.[15]

Pandey dkk, menyatakan bahwa kompetensi kerja didefinisikan sebagai segala sifat dan kemampuan pengetahuan

[15]Gary Dessler. *Human Resource Management*. (England: Pearson Education Limited, Inc. 2007)

serta keterampilan yang dimiliki seseorang (aparat pemerintah desa) dan diperoleh atau dipelajari melalui proses pendidikan, pelatihan, dan pengalaman sehingga yang bersangkutan mampu melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan sangat berhasil.[16]

Perangkat Desa merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan yang terdapat didesa serta mempunyai tugas dalam membantu seseorang kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenang kepala desa tersebut dalam melaksanakan pemerintahan dari desa tersebut dan keperluan dari masyarakat didesa dimana tempattugasnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa kewenangan dalam pengangkatan serta pemberhentian seorang bagian dari pemerintahan desa adalah wewenang dari kepala desa , akan tetapi didalam melaksanakan wewenangnya itu tentunya seorang kepala desa tetap harus sesuai dengan peraturan yang telah diatur didalam undang-undang ataupun peraturan yang berlaku.

Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman dalam (QS Al Hajj 22: 41) :

ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَنَهَوۡاْ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۗ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلۡأُمُورِ ٤١

"(yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedududkan mereka dimuka bumi niscaya mendirikan shalat, menunaikan

[16]Mitrani Alain. Manajemen Sumber Daya Manusia Berdasarkan Kompetensi. (Jakarta: Intermasa.1995).

zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan"

Maka dapat dikatakan bahwa nilai ibadah shalat dapat meningkatkan kualitas hubungan dengan Allah SWT, menjadikan jiwa seorang muslim sebagai jiwa yang kokoh, dan sebagai sarana pengendalian diri bagi seorang muslim. Nilai-nilai ini merupakan hal yang sangat penting adanya bagi setiap manusia, karena dapat mempengaruhi kehidupan manusia itu sendiri. Dalam penerapan sehari- hari jika manusia memiliki jiwa yang kokoh maka akan memiliki pengendalian diri yang kuat terutama dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kompetensi perangkat desa adalah kemampuan yang meliputi banyak hal seperti ilmu pengetahuan, keterampilan , serta sikap kepada masyarakat yang harus dimiliki oleh semua penyelenggara pemerintahan desa selain kepala desa yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat agar memunculkan kemandirian dan kesejahteraan desa dan tetap berpedoman kepada Allah SWT dan menjauhi larangan nya yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Nya.

2. Karakteristik Kompetensi

1) Motif adalah sesuatu yang secara konsisiten dipikirkan atau diinginkan orang yang menyebabkan tindakan. Motif

mendorong, mengarahkan, dan memilih perilaku menuju tindakan atau tujuan tertentu.

2) Sifat adalah karakterisik fisik atau respons yang konsisten terhadap situasi atau informasi. Kecepatan reaksi dan ketajaman mata merupakan ciri fisik kompetensi seseorang.
3) Konsep diri adalah sikap, nilai-nilai, atau citra diri seseorang. Percaya diri merupakan keyakinan orang bahwa meraka dapat efektif dalam hampir setiap situasi adalah bagian dari konsep diri orang.
4) Pengetahuan adalah kompetensi yang kompleks, informasi yang dimiliki orang dalam bidang spesifik.
5) Keterampilan adalah kemampuan mengerjakantugas fisik atau mental tertentu. Kompetensi mental atau keterampilan kognitif termasuk berfikir analitis dan konseptual.[17]

3. Klasifikasi Kompetensi

Charles E. Jhonson dalam Wina Sanjaya membagi kompetensi kedalam 3 bagian yakni: Kompetensi pribadi, yakni kompetensi yang berhubungan dengan pengembangan kepribadian *(personal competency)*, kompetensi professional, yakni kompetensi atau kemampuan yang berhubungan dengan penyelesaian tugas-

[17]" Karakteristik Kompetensi" https://www.e-jurnal.com/2014/02/karakteristik-kompetensi.html?m=1

tugas tertentu, dan kompetensi sosial, yakni kompetensi yang berhubungan dengan kepentingan sosial[18].

Sedangkan pada Kunandar, kompetensi dapat dibagi 5 (lima) bagian yakni:

a. Kompetensi Intelektual, yaitu berbagai perangkat pengetahuan yang ada pada diri individu yang diperlukan untuk menunjang kinerja.
b. Kompetensi fisik, yakni perangkat kemampuan fisik yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas.
c. Kompetensi pribadi, yakni perangkat perilaku yang berkaitan dengan kemampuan individu dalam meujudkan diri, transformasi diri, identitas diri dan pemahaman diri.
d. Kompetensi sosial, yakni perangkat perilaku tertentu yang merupakan dasar dari pemahaman diri sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan sosial.
e. Kompetensi spiritual, yakni pemahaman, penghayatan serta pengamalan kaidah-kaidah keagamaan[19].

[18] Wina Sanjaya, Perencanaan dan Sistem Pembelajaran, (Jakarta : Kencana, 2005) hlm 34

[19]Kunandar, Guru Profesional : Imlementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam sertifikasi guru. (Jakarta : Rajagrafindo Persada. 2007)

4. Indikator Kompetensi Perangkat Desa

Edison, dkk berpendapat bahwa seorang pegawai harus memiliki indikator berikut ini karena merupakan unsur-unsur kompetensi, yaitu:

1) Pengetahuan, hal ini bisa dilihat dari pendidikan dan pengalaman serta dari cara seseorang untuk memahami suatu masalah.
2) Keahlian, hal ini bisa dilihat dari keterampilan/*skill*pegawai dalam kehidupan kerja sehari-harinya.
3) Sikap, hal ini bisa dilihat dari cara pegawai dalam berprilaku serta fasilitas kerjanya.[20]

C. Transparansi

1. Definisi Transparansi

Krina, menjelaskan bahwa transparansi meruoakan prinsip yang menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, yang terdiri dari informasi tentang kebijakan, dan proses pembuatan serta hasil yang dicapai. Untuk itu, setiap organisasi harus memberikan akses informasi kepada seluruh pemangku kepentingan, baik itu kepada

[20]Edison, Emron, Yohny Anwar dan Imas Komariyah, Manajemen Sumber Daya Manusia. (Bandung : Alfabeta. 2017) hlm 143

masyarakat, media, kelompok kepentingan serta pihak terkait lainnya sebagai salah satu wujud penerapan prinsip transparansi.[21]

Menurut Abidin, Transparansi juga dapat diartikan bahwa "informasi yang berkaitan dengan organisasi tersedia secara mudah dan bebas serta bisa diakses oleh mereka yang terkena dampak kebijakan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Selain itu, informasi yang cukup berkaitan dengan kinerja lembagai tersedia dan disajikan dalam bentuk atau media yang mudah dipahami".Hal senada dikemukakan oleh Hermawan yang menyatakan bahwa "transparansi berkaitan dengan informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh siapapun"[22].Dalam islam, transparansi erat kaitannya dengan kejujuran. Ketika menyampaikan informasi pemberi informasi harus bersikap jujur sehingga tidak ada satupun hal yang luput dari pengetahuan penerima informasi temasuk harus mengkomunikasikan segala kebijakan yang mereka lakukan kepada pemberi amanah dalam hal ini yaitu masyarakat. Dan dalam ajaran islam telah disebutkan Allah SWT sejak 1400 tahun yang lalu dalam firmannya dalam QS Al-Bagarah 282 :

[21]Kadek Nurdamasih, Anantawikrama Tungga Atmadja, I Putu Julianto. "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sistem Pemberian Kredit Mutranin Pada *Dadia* tangkas Kori Agung Desa *Pakraman* Bila Bajang, Kecamatan Kubutambahan". Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi. Vol,10. No, 1. (2019) 208-2017

[22]Daniel Aditya Utama dan Rediana Setiayani. "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Responsibilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah Terhadap Kinerja Guru". Vol, 9.No, 2. (2014) 100-114.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٨٢

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaanya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan dengan jujur.Dan persaksikan dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu).Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya.Jangalah saksi-saksi itu enggan (member keterangan) apabila mereka dipanggil; jangalah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya.Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (tulislah muamalah itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu

berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan.Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah;Allah mengajarmu ;dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".

Permaknaan ayat diatas sebuah aktivitas melakukan perbuatan yang berhubungan dengan orang lain yaitu memunculkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi masing-masing termasuk dalam transparansi pelaporan keuangan. Proses pencatatan keuangan dimana pemasukan dan pengeluaran dicatat dengan baik sebagai bukti transparansi.

Berdasarkan pendapat ahli diatas dapat dikatakan bahwa transparansi adalah informasi yang berkaitan dengan organisasi, mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, mudah dipahami, jelas, dan benar, baik informasi keuangan, program, kinerja, dan lain-lain.

2. Prinsip Transparansi

Berdasarkan definisi Transparansi, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip transparansi informasi, meliputi:

a. Mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan ataupun masyarakat.
b. Mudah dpahami dan jelas.
c. Benar atau tidak menyesatkan.

Ministry Watch.com mengemukakan cara untuk mengetahui tingkat transparansi suatu organisasi dengan cara mengelompokkan transparansi ke dalam kategori low, medium, dan high.

Tabel 2.1 Tingkatan Transparansi

1	3	5
Low	Medium	High
Organization failed to respond positively to request for information	Organization responded to part of request or positively to all after multiple follow-ups to the initial request	Organization responded positively no more than one follow- up to the intial request
Oraganiation does not make financial statements of any kind available to the public	Organization makes minimal useful financial information available to the public	Organization makes numerous quality financial statements available to the public

Sumber : Santoso 2004

Tingkatan Transparansi yang dikemukakan oleh Ministry Watch.com dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk menempatkan sekolah dalam tingkatan transparansi. Berdasarkan pendapat Ministry Watch.com tersebut, maka sekolah dikatakan mempunyai tingkat transparansi rendah apabila:

1) Organisasi tidak member respon yang positif terhadap permintaan informasi
2) Organisasi tidak membuat beberapa jenis laporan keuangan yang tersedia untuk publik

Organisasi dikatakan mempunyai tingkat transparansi sedang apabila:

1) Organisasi merespon sebagian permintaan atau merespon secara positif semua informasi yang diminta setelah beberapa kali diminta. Respon positif dapat dilakukan dalam beberapa cara yaitu mengirim informasi yang diminta, memberitahukan dimana informasi yang diminta dapat diakses secara langsung.
2) Organisasi membuat keuangan yang bermanfaat minimal untuk informasi yang tersedia.

Sedangkan organisasi dikatakan mempunyai tingkat transparansi tinggi apabila:

1) Organisasi memberikan respon yang positif pada saat pertama kali diminta memberikan informasi
2) Organisasi memberikan laporan keuangan yang berkualitas dan tersedia untuk umum.

3. Indikator Transparansi

Menurut Kristianten, transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut:

1) Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen
2) Kejelasan dan Kelengkapan Informasi
3) Keterbukaan Proses
4) Kerangka Regulasi yang Menjamin Transparansi

Menurut Irvan M (2017), indikator transparansi adalah:

1) yang Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban
2) Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat
3) Keterbukaan proses pengelolaan
4) Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan dana desa

D. Hubungan Kompetensi Perangkat Desa dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sumber daya manusia yang berkompeten merupakan human capital didalam organisasi.Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional. Kompetensi aparatur desa baik yang sudah pasti akan mendukung pengelolaan keuangan dana desa, begitu juga sebaliknya jika kompetensi aparatur rendah sudah pasti akn menyebabkan pengelolaan keuangan dana desa menjadi terhambat karena masih terdapat kesalahan dalam proses penyusunannya.

Pengelolaan keuangan desa yang baik maka harus didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten, sehingga harus didukung dengan latar belakang pendidikan yang memadai dan mengikuti pelatihan atau pendidikan dalam bidang keuangan. Dengan kata lain, perangkat desa harus memiliki kompetensi yang baik agara akuntabilitas pengelolaan dana desa juga baik. Hal ini sejalan dengan teori stewardship dimana aparat yang bertugas sebagai pelayanan masyarakat memiliki tugas untuk melayani sebagai wujud akuntabilitas, sehingga pada saat pengambilan

keputusan yang terbaik guna memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, sesuai dengan tugas yang seharusnya dilakukan oleh aparat.[23]

Pengelolaan keuangan desa bersifat otonom.Para aparat desa diberikan kewenangan untuk mengelolanya secara baik dan professional. Oleh karena itu, sudah dicanangkan buku pedoman bagi aparat desa bagaimana melakukan penganggaran, bagaimana melakukan keuangan negara, dan bagaimana mengaplikasikan nya kepada masyarakat desa serta bagaimana mengaplikasikan nya dalam pembangunan desa yang berasal dari keuangan negara dan berbagai pendampingan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah agar desa tersebut dapat maju sehingga dapat menciptakan kemandirian desa.

Otonomi desa sejatinya memberikan ruang yang cukup besar bagi aparatur desa.Tuntutan pentingnya adalah mengharapkan pemerintah desa harus kreatif dan inovatif dalam menjalankan kepemerintahannya.Pengelolaan desa yang otonom memang menjadi semakin berat.Desa diberikan kewenangan penuh untuk mengelola keuangannya.Aspek pembangunan dan pemberdayaan harus menjadi kunci sentral bagi pemerintah desa untuk melakukan berbagai inovasi.Masih banyak infrastruktur desa yang membutuhkan sentuhan-sentuhan kreatif dari pemerintah desa, masih belum tersingkapnya potensi desa dan sumber daya desa yang belum tergali secara baik dan maksimal. Masih adanya kebutuhan masyarakat desa yang belum terealisasikan, dan banyak hal lain

[23]Indonesian Journal of Cultural and Comunity Development Vol 10 (2021)

yang bersifat fisik dan non-fisik yang perlu dikelola secara baik oleh pemerintah desa.[24]

E. Hubungan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Transparansi berkaitan dengan adanya keterbukaan tentang kegiatan apa yang telah dilakukan oleh apatur desa. Selain keterbukaan tentang kegiatan, dalam hal ini juga mencakup keterbukaan tentang pelporan atau pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilakukan. Dengan adanya transparansi yang baik, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa juga akan dilakukan dengan baik. Dengan kata lain, ketika aparatur terbuka dengan masyarakat, maka aparatur dalam melakukan pertanggungjawaban penggunaan dana desa kepada masyarakat juga secara maksimal.

Tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskninan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pembangunanpotensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.[25]

Pengelolaan keuangan dana desa dilaksanakan untuk mewujudkan desa sebagai suatu pemerintahan terdepan dan terdekat dengan rakyat, yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga mampu melaksanakan

[24]Hayat, Daris Zunaida, Kemandiiran Desa. (malang ; CV. Citra Intrans Selaras, 2018)
[25]UU No.6 Tahun 2014 tentang desa

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera.

Masyarakat pada era demokrasi ini selalu menuntut adanya pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan transparan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah yang semakin tinggi. Permasalahan lain yang dihadapi adalah kesiapan terkait regulasi dana desa hingga ke level pemerintah daerah belum lengkap. Surat pertanggungjawaban (SPJ) belum memenuhi syarat formal adan material, pemeriksaan atasan langsung atas pengelolaan keuangan belum dilaksanakan sesuai ketentuan. Pengelolaan pembangunan dan administrasi pelaksanaan kegiatan belum tertib.

F. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Mada, Kalangi, Gamaliel, (2017)	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap	Jenis Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif metode survey. Populasi dan samoel adalah aparat pengelola desa di Kabupaten	Diketahui bahwa variabel kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas,

		Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo	Gorontalo. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Pengujian Hipotesis menggunakan Analisis Linier Berganda.	variabel komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas, dan variabel partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2.	Khimayah, (2018)	Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Se-Kabupaten Kudus)	Jenis Penelitian ini adalah Penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa di Kecamatan Sumber dan Kecamatan Rembang sebanyak 132. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 102 dengan teknik simple random sampling. Metode pengumpulan data yaitu kuesione. Metode analisis data analisis statistik	Diketahui bahwa variabel kompetensi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas, dan variabel sistem pengendalian inernal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa.

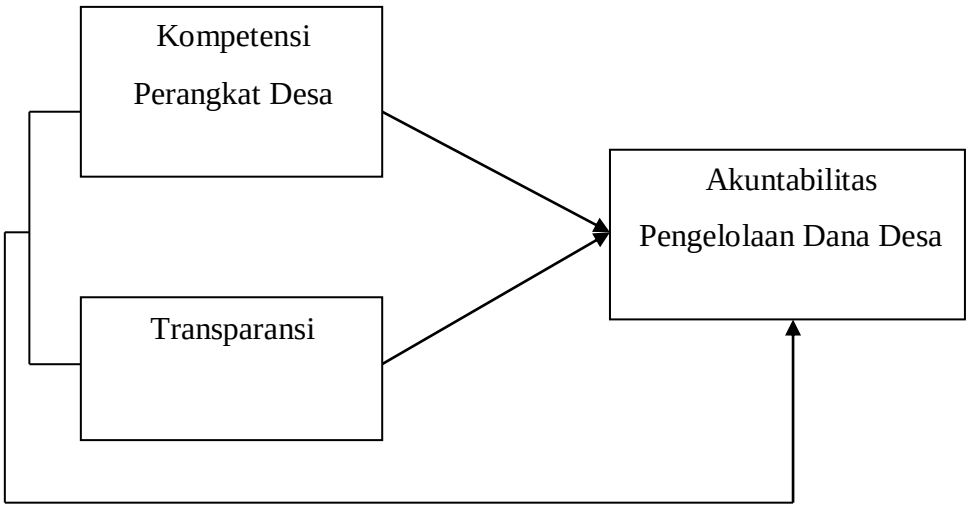
			deskriptif, analisis jalur dan sobel.	
3.	Riska Dwi Astuti (2021)	Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Malate Kabupaten Talakar	Jenis penelitian ini adalah Penelitian Kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda yang kemudian model regresi berganda tersebut dilakukan pengujian hipotesesis, baik secara parsial (uji T) maupun simultan (uji F).	Diketahui bahwa variabel transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa
4.	Prasetyo, (2018)	Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kota Pariaman)	Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Kuantitatif . Populasi nya seluruh kepala desa dan bendahara se-Kota Pariaman. Sampelnya 110 orang. Teknik pengambilan data dengan kuesioner kepada responden. Pengujian Hipotesis pada penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda	Diketahui bahwa variabel kompetensi pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan, variabel sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifian, dan variabel aksesibiltas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan

				dana desa.
5.	Rozanti, (2017)	Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Perangkat Nagari Dalam Pengelolaan Keuangan Nagari Di Kabupaten Tanah Datar	Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Kuantitatif. Populasi nya sebanyak 525 perangkat nagari. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 227 responden dari rumus slovin dan teknik multi stage random sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan pengukuran skala likert. Data penelitian ini dianalisis dengan uji regresi linier berganda.	Diketahui bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perangkat nagari dalam pegelolaan keuangan nagari.
6.	Widyatama, Novita, (2017)	Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)	Jenis Penelitian ini adalah penelitian Kuantitatif. Penelitian ini menggunakan Explanatory research , jumlah sampel sebnayak 61 dengan menggunakan random sampling. Teknik analisis yang digunakan regresi linier berganda.	Diketahui bahwa variabel kompetensi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas, dan variabel sistem pengendalian inernal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa.

Berdasarkan Penelitian Terdahulu diatas, Persamaan nya dari Penelitian ini adalah sama-sama menggunakan Pendekatan atau Jenis Penelitian Kuantitatif. Dan juga terdapat persamaan Uji Regresi Linier Berganda selain itu pada uji Hipotesis nya menggunakan Uji T dan Uji F. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada objek penelitian dan waktu penelitian ini dilakukan.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pikir merupakan jalur pemikiran yang dirancang berdasarkan kegiatan peneliti yang dilakukan. Menurut Mujiman, menyatakan bahwa kerangka pikir adalah konsep berisikan hubungan antara variabel bebas dangan variabel terikat dalam memberikan jawban sementara terhadap masalah yang sedang diteliti.[26]



[26]Mujiman Haris. Manajemen Pelatihan Berbasis Belajar Mandiri. (Yogyakarta : Pustaka Belajar). 2011

H. Hipotesis Penelitian

H1 : Kompetensi perangkat desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H2 : Transparansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H3 : Kompetensi perangkat desa dan Transparansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis peneltian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif kausalitas. Dimana penelitian kuantitatif yang menguji pengaruh kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kelurahan yang ada di Kota Payakumbuh dimulai dari tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan 30 Jun 2023.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

a. Data Primer

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap

suatu benda (fisik), kejadian, atau kegiatan, dan hasil pengujian[27].

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Menurut Bungin, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua dari data yang dibutuhkan.[28] Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dengan menggunakan metode jurnal serta metode documenter (arsip) yaitu berupa data anggaran keuangan serta pendapat pakar, ayat alquran dan literatur yang sesuai dengan tema dalam penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data bdisebut juga dengan subjek penelitin. Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Bisa juga didefinisikan sebagai benda atau orang tempat peneliti mengamati, mambaca, atau bertanya mengenai informasi tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Informasi yang diperoleh dari sumber penelitian ini disebut data. Penelitian ini menggunakan kuesioner dalam pengumpulan datanya, maka sumber data yang

[27]Nur Indriantoro dkk, Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen, (Yogyakarta : ANDI & BPFE, 2018), Hal. 142

[28]Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikatif, Ekonomi, Kebijiakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya (Jakarta: Kencana, 2006) hlm 122

peneliti gunakan adalah Responden. Responden merupakan orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.[29]

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi penelitian

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian atau gejala/ satuan yang ingin diteliti. Jika peneliti ingin meneliti keseluruhan subjek atau elemen yang ada pada subjek maka penelitiannya disebut studi populasi atau studi sensus.

Populasi dalam penelitian ini adalah salah satu dari perangkat desa dikelurahan tersebut di Kota Payakumbuh yang berjumlah 47 kelurahan.

2. Sampel Penelitian

Sampel merupakan bagian atau wakil dari populasi penelitian yang menggunakan sampel, tidak meneliti keseluruhan populasi tetaoi hanya sebagian dari populasi yang diteliti. Penelitian yang hanya menggunakan sejumlah sampel daari populasi disebut studi sampling, karena penelitiannya tidak meneliti keseluruhan subjek yang ada dalam populasi, melainkan hanya sebagian saja daripadanya.[30]

---

[29]Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta : Rineka Cipta, 1998) hlm 114

[30]Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian (Banjarmasin : Antasari Press, 2011) hlm 62

Dalam penelitian ini, sampelnya adalah perangkat desa (kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa) di Kota Payakumbuh. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Sampel Jenuh. Menurut Sugiyono, mendefinisikan Sampling Jenuh adalah teknik pemilihan sampel apabila semua anggota populasi dijadikan sampel. Hal ini sering digunkan bila jumlah populasi relative kecil. Istilah lain sampel jenuhadaalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. Jadi dari penjelasan diatas penulis tidak menentukan sampel, karena seluruh anggota populasi akan diteliti yaitu sebnayak 47 orang .[31]

E. Defenisi Operasional Variabel Penelitian

1. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Akuntablitas pengelolaan dana desa merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perangkat desa atas kegiatan pengelolaan dana desa yang telah dilakukan pada waktu berjalan, dalam bentuk suatu media pertanggungjawaban yang dapat diketahui oleh semua pihak dalam masyarakat.

Tabel 3.1 Definisi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Indikator

Variabel	Indikator
Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah suatu kewajiban untuk memberikan	Ada Penyusunan
	Sesuai Prinsip
	Melibatkan Masyarakat
	Sesuai ketentuan yang berlaku

[31]Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D (Bandung : Alphabet , 2017) hlm 84

pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan akan pengelolaan dana desa oleh suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.	Bekerja sesuai program
	Prinsip hemat, efektif dan efisien
	Sesuai peraturan
	Masyarakat berpartisipasi
	Ada laporan keuangan
	Masyarakat dapat mengakses
	Pelaporan tepat waktu
	Laporan sesuai aturan

2. Kompetensi Perangkat Desa (X1)

Kompetensi perangkat desa adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh perangkat desa untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Tabel3.2 Definisi Kompetensi Perangkat Desa dan Indikator

Variabel	Indikator
Kompetensi perangkat desa adalah suatu kemampuan dalam melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.	Paham siklus akuntansi
	Mengetahui peraturan
	Pengetahuan TI menunjang kerja
	Kemampuan mengeloa
	Mengelola dengan baik
	Mengalokasikan sesuai kenutuhan
	Mampu menyusun dan menyajikan laporan
	Perangkat desa jujur
	Perangkat desa berhati-hati
	Perangkat desa teliti

3. Transparansi (X2)

Transparansi merupakan suatu keterbukaan yang dilakukan oleh perangkat desa untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat atas apa yang relah dilakukannya. Transparansi dalam hal ini termasuk keterbukaan akan perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa.

Tabel 3.3 Definisi Transparansi dan Indikator

Definisi	**Indikator**
Transparansi adalah suatu tindakan keterbukaan yang dilakukan pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dan membangun kepercayaan masyarakat melalui kemudahan akses informasi yang memadai, guna mendapatkan informasi yang akurat.	Menyediakan akses informasi
	LPI dapat dilihat
	Ada musrenbang
	Melibatkan masyarakat
	Pengumuman pengelolaan
	Diketahui masyarakat
	Dapat diakses dengan mudah
	Dokumen sesuai yang sebenarnya

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan Survei, Observasi, Dokumenter dan Kuesioner.

Teknik Survei digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data informasi tentang populasi yang besar dengan menggunakan sampel yang relatif lebih kecil. Asmadi Alsa, mengemukakan rancangan survei merupakan prosedur dimana peneliti malaksanakan survei atau

memberikan angket atau skala pada satu sampel untuk mendeskripsikan sikap, opini, perilaku, atau karakteristik responden.[32]

Teknik Observasi atau pengamatan berarti melihat dengan penuh perhatian. Dalam konteks penelitian, observasi diartikan sebagai cara-cara mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku individu atau kelompok yang diteliti secara langsung. Definisi yuyang lebih umum dikemukakan oleh Margono, yaitu observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dapat dilakukan secara lansung maupun tidak langsung. Pengamatan secara lansung berarti peneliti langsung berarti peneliti langsung melakukan pengamatan terhadap objek penelitiannya ditempat dan waktu terjadinya peristiwa, sementara pengamatan tidak langsung dilakukan melalui perantaraan alat tertentu, seperti rekaman video, film, rangkaian slide, dan rangkaian photo.[33]

Teknik dokumenter atau disebut juga teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang di dokumentasikan) berupa dokumen tertulis dapat berupa arsip, catatan harian, autobiografi, memorial, kumpulan surat pribadi, kliping, dan sebagainya. Sementara dokumen terekam dapat berupa film, kaset rekaman, mikrofilm, foto dan sebagainya. Didalam penelitian ini

[32]Asmadi Alsa. Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif serta Kombinasinya dalam penelitian. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
[33]Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta : Akademia Pressindo, 2008)

teknik dokumenter nya berupa arsip laporan keuangan sekeretariat dan juga data pendidikan dari kelurahan.[34]

Teknik angket atau teknik kuesioner merupakan teknik pengumpulan data berupa daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis untuk diisi oleh responden. Angket memiliki komponen yaitu petunjuk pengisian, bagian identitas responden, (nama, jenis kelamin, pekerjaan, usia dan lainnya), dan daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis. Jenis kuesioner dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup merupakan kuesioner yang berisi daftar pertanyaan dengan sjumlah alternatif *(option)* jawaban yang sudah ditentukan oleh peneliti dan tidak memberi kesempatan kepada reponden untuk memberi jawaban lain selain jaaban yang telah disediakan.[35] Setiap jawaban dari responden, peneliti menentukan sebagai berikut:

a. Untuk jawaban Sangat Setuju (SS) responden diberi skor 5
b. Untuk jawaban Setuju (S) responden diberi skor 4
c. Untuk jawaban Netral (N) responden diberi skor 3
d. Untuk jawaban Tidak Setuju (TS) responden diberi skor 2
e. Untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) responden diberi skor 1

Kuesioner ini diajukan kepada responden yang merupakan pemerintah kelurahan, yaitu salah satu dari perangkat kelurahan kepala kelurahan, sekretaris kelurahan, dan bendahara kelurahan.

[34]Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian (Banjarmasin : Antasari Press, 2011) hlm 85
[35]Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian (Banjarmasin : Antasari Press, 2011) hlm 84

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dapat dimaknai sebagai suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan dasar. Setelah itu dilanjutkan dengan penafsiran (interpretasi) data. Secara singkat dapat dikatakan bahwa teknik analisis data merupakan penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Yang dimaksud dengan interpretasi disini adalah memberi akti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian. Untuk meningkatkan pemahaman itu, peneliti memberikan penjelasan secara konsepsional terhadap data yang ada sehingga dapat diperoleh kejelasan arti yang sebenar-benarnya yang terkandung dalam data tersebut.[36]

1. Analisis Deskriptif Persentase

Metode Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif persentase dan menggunakan Skala Likert.Analisis deskriptif persentase digunakan untuk mendeskripsikan masing-masing indikator dalam setiap variabel agar lebih mudah untuk memahaminya. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Persentase skor (\%)} = \frac{n}{N} \text{ x } 100\%$$

[36]Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian (Banjarmasin : Antasari Press, 2011) hlm 92

Keterangan:

n : Nilai yang diperoleh

N : Jumlah seluruh Nilai

% : Persentase

Langkah-langkah untuk menentukan atau jenis deskriptif presentase yang diperoleh dari masing-masing indikator dalam variabel, yaitu dari perhitungan deskriptif presentase kemudian ditafsirkan ke dalam kalimat. Adapun cara untuk menentukan kriteria deskriptif variabel kompetensi perangkat desa yaitu dibuat dengan kategori melalui perhitungan sebagai berikut:

a. Skor tertinggi = 6 x 5 = 30

b. Skor terendah = 6 x 1 = 6

c. Rentang = 30 - 6 = 24

d. Interval = 24 : 5 = 4,8 dibulatkan menjadi 5

Tabel 3.4 Jenjang Kriteria Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

No	Interval	Kriteria
1	26 -30	Sangat Baik
2	21 – 25	Baik
3	16 – 20	Cukup
4	11 - 15	Tidak Baik
5	6 – 10	Sangat Tidak Baik

Penentuan kriteria deskriptif variabel kompetensi perangkat desa yaitu dibuat dengan kategori melalui perhitungan sebagai berikut:

a. Skor Tertinggi = 7 x 5 = 35
b. Skor Terendah = 7 x 1 = 7
c. Rentang = 35 – 7 = 28
d. Interval = 28 : 5 = 5,6 dibulatkan menjadi 6

Tabel 3.5 Jenjang Kriteria Variabel Kompetensi Perangkat Desa

No.	Interval	Kriteria
1	30-35	Sangat Baik
2	24-29	Baik
3	18-23	Cukup
4	12-17	Tidak Baik
5	6-11	Sangat Tidak Baik

Penentuan kriteria deskriptif variabel transparansi yaitu dibuat dengan kategori melalui perhitungan sebagai berikut:

a. Skor Tertinggi = 7 x 5 = 35
b. Skor Terendah = 7 x 1 = 7
c. Rentang = 35 - 7 = 28
d. Interval = 28 : 5 = 5,6 dibulatkan menjadi 6

Tabel 3.6 Jenjang Kriteria Variabel Transparansi

No.	Interval	Kriteria
1	30 – 35	Sangat baik
2	24 – 29	Baik

3	18 – 23	Cukup
4	12 – 17	Tidak Baik
5	6 – 11	Sangat Tidak Baik

2. Uji Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Sedangkan menurut Sugiharto dan Sitinjak, validitas berhubungan dengan suatu peubah mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas dalam penelitian terhadap isi sebenarnya yang diukur. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur.[37]

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kesamaan antar data yang dikumpulkan dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang valid.Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan (mengukur) fakta itu juga valid. Untuk menentukan valid tidaknya suatu instrumen adalah dengan mengkonsultasikan hasil r hitung dengan r tabel dengan ketentuan r minimal

[37]Imam Ghozali. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. (Semarang : UNDIP)

0,3. Apabila r hitung > r tabel maka dikatakan valid.Namun, apabila r hitung <r tabel maka dikatakan tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Menurut Sumadi Suryabrata realibilitas menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dengan alat tersebut dapat dipercaya. Hasil pengukuran harus reliabel dalam artian harus memiliki tingkat konsistensi dan kemantapan. Reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi konstrak atau variabel penelitian.Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Menurut Nunnally dalam Ghozali, untuk menentukan reliabel tidaknya suatu instrumen adalah dengan membandingkan angka *Cronbach Alpha*.Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha > 0,60.*[38]

[38]Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro)

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Menurut Ajija, uji normalitas diperlukan ketika jumlah observasi kurang dari 30. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah *error term* mendekati distribusi normal. Jika jumlah observasi melebihi 30, maka tidak perlu dilakukan uji normalitas karena distribusi sampling error term telah mendekati normal. [39]

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi variabel terikat dana bebas mempunyai distribusi yang normal atau tidak normal. Model regresi ysng baik adalah yang memiliki distribusi normal atau yang mendekati nol. Uji Norialitas dalam penelitian ini menggunakan Uji *Kolmogrov-Smirnov*. Dengan ketentuan bahan data berdistribusi normal atau tidak, dengan ketentuan bahwa data berdistribusi normal bila memenuhi kriteria nilai sig > 0,05, sebaliknya jika nilai sig < 0,05 maka data dikatakan tidak berdistribusi normal.

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara

[39]Shochrul Rohmatul Ajija. Cara Cerdas Menguasai Eviews (Jakarta : Salemba Empat) 2011

kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu obeservasi ke observasi lainnya. Jika data observasi diatas 100 data maka sebaiknya menggunkan uji Lagrange Multiplier.

Untuk mendeteksi terdapat atau tidaknya auto korelasi adalah dengan melakukan Uji *Durbin-Watson*.

Kriteria pengambilan keputusan :

1) Jika $0 < d < dL$, berarti ada autokorelasi positif.
2) Jika $4 < dL < d < 4$,berarti ada auto korelasi positif atau negatif.
3) Jika $2 < d < 4 - dU$ atau $dU < d < 2$, berarti tidak ada autokorelasi positif atau negatif.
4) Jika $dL < d < 4 - dU$ maka tidak terjadi autokorelasi.[40]

c. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah pada suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent. Hal tersebut

[40]Imam Ghozali, "Aplikasi Analisis Multivarietive dengan program IBM SPSS 23", (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016).

berarti standar error besar, akibatnya, ketika koefisien diuji, t hitung akan bernilai kecil dari t tabel. hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan linear antara variabel independent atau variabel bebas yang dipenuhi dengan variabel dependen atau variabel terikat.[41]

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Apanila terjadi korelasi antara variabel bebas, maka terdapat problem multikolinearitas pada model regresi tersebut. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Uji multikolinearitas dapat dilihat pada nilai tolerance dan lawannya variance inflation faktor (VIF). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF >10.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi

[41]Imam Ghozali. Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS. (Semarang : Badan Penerbit Unkiversitas Diponegoro.

heteroskedastisitas. Apabila varian berbeda, disebut heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan pad amodel regresi untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual pada suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Biasanya data *crossection*mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang meakili berbagai ukuran kecil, sedang, dan besar.[42]

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedasitistas yaitu dengan melakukan uji*Park*. Adapun kriteria uji *Park* adalah jika nilai probabilitas > 0,05, maka dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Akan tetapi, jika nilai probabilitas < 0,05, maka dikatakan terjadi gejala heteroskedasrisitas.

4. Uji Regresi Linier Berganda

Menurut Ghozali, analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Bertujuan untuk mengestimasi dan memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui rumus regresi. Analisis ini bertujuan untuk menguji pengaruh

[42]Imam Ghozali. Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS. (Semarang : Badan Penerbit Unkiversitas Diponegoro.

variabel independen yaitu Kompetensi Perangkat Desa (X1), dan Transparansi (X2) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y). pengujian nya pada analisis regresi linear berganda dapat diformulasikan seperti dibawah ini :

Y = a + b1X1 + b2X2

Keterangan :

Y : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

a : Nilai Intersep (konstan)

b1,b2 : Koefisien Regresi

X1 : Kompetensi Perangkat Desa

X2 : Transparansi

5. Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi parsial (r2) digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi yang diberikan oleh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.Untuk mengetahui koefisien determinasi parsial menggunakan SPSS v.22.Ketika melakukan uji parsial, yaitu pada tabel *coeefficients*.Caranya dengan menguadratkan nilai *correlations partial* dalam tabel, kemudian diubah ke dalam bentuk persentase.Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai satu.Nilai R2 yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel depeden amat terbatas. Kelemahan dari koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap ada penambahan variabel independen maka R2 pasti akan meningkat tanpa mempedulikan apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, digunakanlah model *adjusted R2*. Model *adjusted R2* dapat naik atau turun apabila ada suatu variabel independen yang ditambahkan ke dalam model[43].

6. Uji Hipotesis

a. Uji T

Uji T dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian mengenai pengaruh dari masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Uji T (Test T) adalah salah satu test statistik yang dipergunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis yang menyatakan bahwa diantara dua buah mean sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama, tidak terdapat perbedaan yang signifikan.

Pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat nilai signifikansi pada tabel Coefficients. Biasanya dasar pengujian hasil regresi dilakukan dengan tingkat

[43] Imam Ghozali, "Aplikasi Analisis Multivarietive dengan program IBM SPSS 23", (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016).

kepercayaan sebesar 95% atau taraf signifikannya sebesar 5% (α = 0,05).[44]

Adapun kriteria dari uji statistik t :

1) Jika nilai signifikansi uji t > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak.
2) Jika nilai signifikansi uji t < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima..
3) Jika nilai t hitung > t tabel maka H0 ditolak dan Ha diterima
4) Jika nilai t hitung < t tabel maka H0 diterima dan Ha ditolak.

b. Uji F

Uji F bertujuan untuk mencari aoakah variabael independen secara bersama-sama (stimultan) memperngaruhi variabel dependen. Uji f dilakukan untuk melihat pengaruh dari seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Tingkatan yang digunkan adalah sebesar 5% atau 0,05, jika nilai signifikan F < 0,05 maka dapat diartikan variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen ataupun sebaliknya.

[44]Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro)

Uji simultan F digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara bersama-sama atau simultan anatara variabel independen terhadap variabel. Pengujian statistik anova merupakan bentuk pengujian hipotesis dimana dapat menarik kesimpulan berdasarkan data atau kelompok statistik yang disimpulkan.

Adapun kriteria penilaian sebagai berikut:

1) Jika nilai signifikansi uji f < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima
2) Jika nilai signifikansi uji f > 0,05 maka H0 diterima dan H0 ditolak
3) Jika nilai f hitung > f tabel maka H0 ditolak dan Ha diterima
4) Jika nilai f hitung < f tabek maka H0 diterima dan Ha ditolak.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Profil Kota Payakumbuh

Payakumbuh adalah sebuah kota yang berada di provinsi Sumatra Barat, Indonesia. Kota Payakumbuh merupakan daerah kantong (*enclave*)' dari Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada pertengahan tahun 2021, jumlah penduduk kota Payakumbuh sebanyak 141.171 jiwa.

Kota ini didominasi oleh etnis Minangkabau, namun terdapat juga etnis Tionghoa, Tamil, Jawa dan Batak, dengan jumlah angkatan kerja 50.492 orang dan sekitar 3.483 orang diantaranya merupakan pengangguran. Pada tahun 1943 etnis Tionghoa di kota ini pernah mencapai 2.000 jiwa dari 10.000 jiwa total populasi masa itu. Dari segi jumlah penduduk, pada tahun 1970 Payakumbuh berada pada peringkat ketiga sesudah Padang dan Bukittinggi. Akan tetapi perbedaan jumlah penduduk Payakumbuh dengan Bukittinggi relatif kecil yaitu hanya 784 orang. Pada tahun 2009 atau 40 tahun kemudian, jumlah penduduk Payakumbuh meningkat pesat menjadi 106 726 jiwa. Akan tetapi masih tetap berada pada peringkat ketiga sesudah Bukittinggi dengan perbedaan jumlah 894 orang. Walaupun demikian, peningkatan jumlah penduduk ini meningkatkan status Kota Payakumbuh dari kota kecil (jumlah penduduk < 100.000 orang), menjadi kota menengah (jumlah penduduk > 100.000 orang).

Tabel 4.1 Daftar kelurahan di Kota Payakumbuh adlah sebagai berikut :

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Daftar
13.76.04	Lamposi Tigo Nagarai	6	Koto Panjang dalam , Koto Panjang Padang, Padang Sikabu, Parambahan, Parik Muko Aia, Sungai Durian.
13.76.01	Payakumbuh Barat	17	Bulakan Balai Kandi, Ibuh, Koto Tangah, Kubu Gadang, Labuh Basilang, Nunang Daya Bangun, Padang Datar, Tanah Mati, Padang Tinggi Piliang, Padang Tongah Balai Nan Duo, Pakan Sinayan, Parak Betung, Parit Rantang, Payolansek, Subarang Batuang, Talang, Tanjuang Godang Sungai Pinago, tanjung Pauh.
13.76.05	Payakumbuh Selatan	6	Balai Panjang, Kapalo Koto Ampangan, Koto Tuo

			Limo Kampuang, Limbukan, Padang Karambia, Sawah Padang Aua Kuniang.
13.76.03	Payakumbuh Timur	9	Balai Jaring, Koto Baru, Koto Panjang, Padang Alai Bodi, Padang Tangah Payobadar, Padang Tiakar, Payobasung, Sicincin, Tiakar.
13.76.02	Payakumbuh Utara	9	Balai Tongah Koto, Ikua Koto Dibalai, Kapalo Koto Dibalai, Kotokociak Kubu Tapakrajo, Napar, Ompang Tanah Sirah, Taratak Padang Kampuang, tigo Koto Diate, Tigo Koto Dibaruah.

B. Hasil Penelitian

Deskripsi variabel-vaariabel dalam penelitian ini meliputi akuntabilitas pengelolaan dana desa, kompetensi perangkat desa, dan transparansi. Ketiga variabel tersebut akan diuraikan secara rinci sebagai berikut:

1. Analisis Statistik Deskriptif

a. Analisis Statistik Deskriptif Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Perhitungan analisis statistik deskriptif untuk variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa menggunakan SPSS v.22, diperoleh data pada Tabel 4.2

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

N	Valid	47
	Missing	0
Mean		27,60
Std. Deviation		2,007
Range		7
Minimum		23
Maximum		30

Dilihat dari jawaban angket masing-masing pemerintah desa, maka gambaran variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dilihat pada tabel 4.3

Tabel 4.3 Analisis Deskriptif Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

No.	Interval	Jumlah	Persentase	Kategori
1.	26 – 30	39	82,98%	Sangat Baik
2.	21 – 25	8	17,02%	Baik
3.	16 – 20	0	0	Cukup Baik
4.	11 – 15	0	0	Tidak Baik
5.	6 – 10	0	0	Sangat Tidak Baik
Jumlah		47	100%	

Berdasarkan Tabel. diperoleh nilai minimum sebesar 23 yang termasuk kategori yang baik dan nilai maksimum sebesar 30 yang termasuk kategori sangat baik dalam vaariabel akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan nilai mean sebesar 27,60 yang termasuk dalam kategori sangat baik. Berdasarkan tabel. dapat dilihat bahwa rata-rata keseluruhan akuntabilitas pengelolaan dana desa tergolong sangat baik dengan persentase sebesar 82,98%.

b. Analisis Statistik Deskriptif Kompetensi Perangkat Desa

Perhitungan analisis statistik deskriptif untuk variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa menggunakan SPSS v.22, diperoleh data pada Tabel 4.4

Tabel 4.4 Statistik Deskriptif Kompetensi Perangkat Desa

N	Valid	47
	Missing	0
Mean		31,51
Std. Deviation		2,358
Range		9
Minimum		26
Maximum		35

Dilihat dari jawaban angket masing-masing pemerintah desa, makagambaran variabel kompetensi perangkat desa dapat dilihat pada tabel 4.5

Tabel 4.5 Analisis Deskriptif Kompetensi Perangkat Desa

No.	Interval	Jumlah	Presentase	Kategori
1.	30 – 35	38	80,85%	Sangat Baik
2.	24 - 29	9	19,15%	Baik
3.	18 – 23	0	0	Cukup Baik
4.	12 – 17	0	0	Tidak Baik
5.	6 – 11	0	0	Sangat Tidak Baik
Jumlah		47	100%	

Berdasarkan tabel. diperoleh nilai minimum sebesar 26 yang termasuk kategori baik dan nilai maksimum sebesar 35 yang termasuk kategori sangat baik dalam variabel kompetensi perangkat desa. Sedangkan nilai mean sebesar 31,51 yang termasuk dalam kategori sangat baik. Berdasasrkan tabel. dapat dilihat bahwa rata-rata keseluruhan kompetensi perangkat desa tergolong sangat baik dengan presentase sebesar 80,85%.

c. Analisis Statistik Deskriptif Transparansi

Perhitungan analisis statistik deskriptif untuk variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa menggunakan SPSS v.22, diperoleh data pada Tabel 4.6

Tabel 4.6 Statistik Deskriptif Transparansi

N	Valid	47
	Missing	0
Mean		30,40
Std. Deviation		2,356
Range		8
Minimum		27
Maximum		35

Dilihat dari jawaban angket masing-masing pemerintah desa, makagambaran variabel transparansi dapat dilihat pada tabel 4.7

Tabel 4.7 Analisis Statistik Deskriptif Transparansi

No.	Interval	Jumlah	Presentase	Kategori
1.	30 – 35	29	61,70%	Sangat Baik
2.	24 – 29	18	38,30%	Baik
3.	18 – 23	0	0	Cukup Baik
4.	12 – 17	0	0	Tidak Baik
5.	6 – 11	0	0	Sangat Tidak Baik
Jumlah		47	100%	

Berdasarkan tabel 4.7 diperoleh nilai minimum sebesar 27 yang termasuk kategori baik dan nilai maksimum sebesar 35 yang

termasuk kategori sangat baik dala variabel transparansi. Sedangkan nilai mean sebesar 30,40 yang termasuk kategori sangat baik. Berdasarkan tabel. dapat dilihat bahwa rata-rata keseluruhan transparansi tergolong sangat baik dengan persentase sebesar 61,70%.

2. Uji Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas

Hasil uji coba pada variabel penelitian akuntabilitas pengelolaan dana desa, kompetensi perangat desa, dan transparansi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8Hasil Uji Validitas Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Nomor Item	*Corrected Item-Total Correlation*	r tabel	Keterangan
Y.1	0,523	0,287	Valid
Y.2	0,687	0,287	Valid
Y.3	0,306	0,287	Valid
Y.4	0,731	0,287	Valid
Y.5	0,366	0,287	Valid
Y.6	0,789	0,287	Valid

Berdasarkan tabel. diatas, dari 6 pertanyaan pada variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa yang diajukan kepada 47 responden, dapat diketahui bahwa item nomor 1 sampai 6 dinyatakan valid, karena r hitung > r tabel.

Tabel 4.9Hasil Uji Validitas Kompetensi Perangkat Desa

Nomor Item	*Corrected Item-Total Correlation*	r tabel	Keterangan
X7	0,639	0,287	Valid
X8	0,630	0,287	Valid
X9	0,628	0,287	Valid
X10	0,749	0,287	Valid
X11	0,601	0,287	Valid
X12	0,627	0,287	Valid
X13	0,711	0,287	Valid

Berdasarkan tabel. diatas, dari 7 pertanyaan pada variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa yang diajukan kepada 47 responden, dapat diketahui bahwa item nomor 7 sampai 13 dinyatakan valid, karena r hitung > r tabel.

Tabel 4.10Hasil Uji Validitas Transparansi

Nomor Item	*Corrected Item-Total Correlation*	r tabel	Keterangan
X14	0,567	0,287	Valid
X15	0,644	0,287	Valid
X16	0,530	0,287	Valid
X17	0,698	0,287	Valid
X18	0,578	0,287	Valid
X19	0,646	0,287	Valid
X20	0,564	0,287	Valid

Berdasarkan tabel. diatas, dari 7pertanyaan pada variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa yang diajukan kepada 47 responden, dapat diketahui bahwa item nomor 14 sampai 20 dinyatakan valid, karena r hitung > r tabel.

b. Uji Reliabilitas

Tabel 4.11 Hasil Perhitungan Uji Reliabilitas

No.	Variabel	*Cronbach's Alpha*	Minimal *Croncbach's Alpha* yang diisyaratkan	Keterangan
1.	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0,631	>0,60	Reliabel
2.	Kompetensi Perangkat Desa	0,765	>0,60	Reliabel
3.	Transparansi	0,710	>0,60	Reliabel

Berdasarkan data yang ada dalam tabel diatas, dapat diketahui bahwa semua variabel penelitian memiliki nilai koefesiensi reliabilitas yang lebih tinggi daripada Croncbach Alpha yang diisyaratkan, yaitu sebesar 0,60. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa uji coba instrumen ini memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi, atau dapat dikatakan hasil instrumen ini dapat dipercaya.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi variabel terikat dan bebas mempunyai distribusi yang normal atau tidka normal. Uji ini dilakukan menggunakan Uji *Kolmogrov-Smirnov* Test dengan bantuan SPSS v.22. Adapun hasil dari uji normalitas dapat dilihat pada tabel 4.11.

Tabel 4.12 Hasil Uji Coba Normalitas dengan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebagai Variablel Dependen.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		47
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,03744523
Most Extreme Differences	Absolute	,104
	Positive	,061
	Negative	-,104
Test Statistic		,104
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200[c,d]

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan tabel diketahui bahwa besarnya nilai Kolmogrov-Smirnov adalah 0,104 san dinilai signifikasi sebesar 0,200, hasil ini lebih besar dari taraf signifikasi 0,05. Oleh karena itu, data yang diambil dalam penelitian ini berdistribusi normal.

b. Uji Autokorelasi

Tabel 4.13 Hasil Uji Auto korelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,196[a]	,039	,017	1,990	2,603

a. Predictors: (Constant), Transparansi

b. Dependent Variable: Akuntabilitas

Berdasarkan hasil dari tabel 4.13 menunjukkan bahwa DW sebesar 2,603, sedangkan tabel DW dengan signifikan 0,05 jumlah sampel 47, variabel independen 2 (k=2) diperoleh DL sebesar 1.443 dan DU 1.612. Berdasarkan data diatas 1.612 < 2.603 > 2.388 sehingga dapat disimpulkan data terdapat autokorelasi.

c. Uji Multikolinearitas

Tabel 4.13 Hasil Uji Multikolinearitas dengan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Sebagai Variabel Dependen

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	16,399	4,412		3,717	,001		
	Kompetensi	,309	,128	,363	2,409	,020	,852	1,174
	Transparansi	,048	,128	,057	,377	,708	,852	1,174

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

Berdasarkan tabel, diketahui nilai tolerance berturut-turut sebesar 0,852 dengan nilai VIF berturut-turut sebesar 1,174 dimana nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIP <10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

d. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.14Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebagai Variabel Dependen

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,849	3,778		-,225	,823
	Kompetensi	,211	,110	,299	1,927	,060
	Transparansi	-,181	,110	-,255	-1,645	,107

a. Dependent Variable: LN_RES

Berdasarkan tabel diketahui bahwa nilai signifikansi berturut-turut adalah 0,060 untuk X1 dan 0,107 untuk X2 dimana lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model dalam penelitian ini tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

4. Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 4.15 Hasil Uji Linier Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	16,399	4,412		3,717	,001
	Kompetensi	,309	,128	,363	2,409	,020
	Transparansi	,048	,128	,057	,377	,708

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

$$Y = a + b1.X1 + b2.X2$$

$$= 16.399 + 0,309 + 0,048$$

a) Nilai a sebesar 16.399 merupakan konstanta atau keadaan saat variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa belum dipengaruhi oleh variabel lain yaitu kompetensi perangkat desa sebagai X1 dan variabel transparansi sebagai X2. Jika variabel independen tidak ada maka variabel akuntabilitas tidak mengalami perubahan.

b) b1 (nilai koefisien regresi X1) sebesar 0,309 menunjukkan bahwa variabel kompetensi mempunyai pengaruh yang positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang berarti bahwa setiap kenaikan satu variabel kompetensi maka akan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa 0,309 dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.

c) b2 (nilai koefisien regresi X2) sebesar 0,048 menunjukkan bahwa variabel transparansi mempunyai pengaruh yang positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang

berarti bahwa setiap kenaikan satu variabel transparansi maka akan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa 0,048 dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.

5. Koefisien Determinasi Simultan (R^2)

Tabel 4.16 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,388[a]	,151	,112	1,891

a. Predictors: (Constant), Transparansi, Kompetensi

Berdasarkan tabel dipengaruhi nilai koefisien R Square (R^2) sebesar 0,112 atau 11,2%. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dijelaskan sebesar 11,2% oleh variabel independen, yaitu kompetensi perangkat desa dan transparansi. Sedangkan 88,8% (100% - 11,2%) variasi akuntabilitas pengelolaan dana desa dijelaskan oleh variabel-variabel diluar variabel independen dalam penelitian ini yaitu varibel Penggunaan Aplikasi Siskeudes, variabel Kepatuhan Pajak Bendaharawan, Variabel Partisipasi Masyarakat dan Variabel Peran Perangkat Desa. Jadi, bisa diambil kesimpulan besarnya pengaruh variabel kompetensi terhadap akuntabilitas pengelolaan

dana desa sebesar 0,112 (11,2%).Nilai koefisien determinasi ini termasuk kecil oleh karena itu hasil ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel depeden amat terbatas.

6. Uji Hipotesis.

a. Uji T

Tabel 4.17 Hasil Uji T

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	16,399	4,412		3,717	,001
	Kompetensi	,309	,128	,363	2,409	,020
	Transparansi	,048	,128	,057	,377	,708

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

Dasar pengambilan keputusan :

T tabel = t (a/2 ; n-k-1)

a 5% = t (0,05/2 ; 47-3-1)

= 0,025 ; 43 = 2,011

Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa

1) Nilai Signifikan untuk Pengaruh Kompetensi Perangkat Desaterhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah sebesar 0,020 yang mana < 0,05 dan dilhat dari T hitung 2,409 > T tabel 2,011. Hal ini berarti kompetensi perangkat desa (X1)

berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y). Hal tersebut menunjukkan bahwa H1 yang menyatakan kompetensi perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dan desa diterima.

2) Nilai signifikasi untuk pengaruh Transparansi (X2) terhadap Akuntabilitas Pengeloaan Dana Desa sebesar 0,708 yang mana > 0,05 dan dilihat dari T hitung 0,377 < T tabel 2,011. Hal ini berarti transparansi (X2) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y). Hal tersebut menunjukkan bahwa H2 yang menyatakan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ditolak.

b. Uji F

Tabel 4.18 Hasil Uji F

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	27,902	2	13,951	3,900	,028[b]
	Residual	157,417	44	3,578		
	Total	185,319	46			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

b. Predictors: (Constant), Transparansi, Kompetensi

Dasar pengambilan keputusan:

Nilai f Hitung 3,90

Nilai f tabel 3,20

Nilai f hitung > f tabel / 3,90 >3,20

Nilai signifikansi 0,028 < 0,05

Berdasarkan tabel 4.18 dapat diperoleh keputusan jika nilai signifikansi < 0,05 yaitu sebesar 0,028 < 0,05 dan nilai F hitung > F tabel yaitu sebesar 3,90 > 3,20 dan, maka variabel Kompetensi dan Transpransi berpengaruh terhadap akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa H1 yang menyatakan bahwa kompetensi perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa diterima.Berdasarkan hasil analisis deskriptif kompetensi perangkat desa diperoleh rata-rata 31,51, angka tersebut termasuk dalam kategori sangat baik. Selain itu, berdasarkan uji signifikansi (uji t) variabel kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa signifikansi 0,020 < 0,05 dan jika T hitung 2,409 > T tabel 2,011sehingga H1 diterima dan signifikan. Semakin baik kompetensi perangkat desa maka

akan semakin baikpula akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat desa di Kota Payakumbuh memiliki kompetensi yang sangat baik, yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kompetensi perangkat desa yang sangat baik akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendorong akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kompetensi perangkat desa merupakan salah satu faktor yang paling dominan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Prasetyo juga menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan trhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kemudian penelitian Rezkiyanti juga menunjukkan bahwa kompetensi perangkat desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun, penelitian ini bertentangan dengan penelitian Khimayah, yang menunjukkan bahwa kompetensi perangkat desa berpengaruh desatidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

2. Pengaruh Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa H2 yang menyatakan transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.Berdasarkan hasil analisis deskriptif transparansi diperoleh rata-rata 30,40 angka tersebut

termasuk dalam kategori sangat baik. Namun, berdasarkan uji signifikansi (uji t) variabel transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa signifikansi 0,708 > 0,05 dan dilihat dari T hitung 0,377 < T tabel 2.011. Semakin baik transparansi, maka akan semakin buruk akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dalam penelitian ini transparansi berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik transparansi maka akan semakin rendah akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan sebaliknya. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur transparansi, salah satunya adalah keterbukaan dokumen yang memiliki nilai paling rendah dibandingkan dengan indikator yang lain. Hal ini bisa menjadi penyebab transparansi berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Ketika pemerintah desa hanya terbuka terhadap pengelolaan dana desa, akan tetapi tidak terbuka akan dokumen yang berhubungan dengan dana desa, maka akan membuat masyarakat curiga dan bisa saja terjadi kesalahpahaman antara perangkat desa dengan masyarakat karena kurangnya transparan dalam keterbukaan dokumen yang berhubungan dengan dana desa. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Riska Dwi Astuti yang menujukkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3. Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa H3 yang menyatakan bahwa kompetensi perangkat desa dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa diterima. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa nilai adjusted R^2 sebesar 0,112 atau 11,2%. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dijelaskan sebesar 11,2% oleh variabel independen, yaitu kompetensi perangkat desa dan transparansi. Jadi, bisa diambil kesimpulan besarnya pengaruh variabel kompetensi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 0,112 (11,2%).

Selain itu, dapat dilihat dari Uji F, dilihat dari keputusan bahwa nilai F hitung > F tabel yaitu sebesar 3,90 > 3,20 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu sebesar 0,028 < 0,05. Maka dapat diperoleh keputusan bahwa variabel Kompetensi dan Transparansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1) kompetensi perangkat desa (X1) diperoleh t hitung sebesar 2,409 dengan signifikasi sebesar 0,020 yang mana < 0,05. Hal ini berarti kompetensi perangkat desa (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y). Hal tersebut menunjukkan bahwa H1 yang menyatakan kompetensi perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dan desa diterima.
2) transparansi diperoleh t hitung sebesar 0,377dengan signifikasi sebesar 0,708 yang mana > 0,05. Hal ini berarti transparansi (X2) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y). Hal tersebut menunjukkan bahwa H2 yang menyatakan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ditolak.
3) Kompetensi perangkat desa dan transparansi dapat diketahui bahwa nilai adjusted R^2 sebesar 0,112 atau 11,2%. Dilihat dari Uji F, bahwa nilai F hitung > F tabel yaitu sebesar 3,90 > 3,20 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu sebesar 0,028 < 0,05. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa H3 yang menyatakan kompetensi perangkat

desa dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa diterima.

B. Saran

Berdasarkan analisis dan penelitian yang dilakukan, peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1) Perangkat desa hendaknya dapat lebih meningkatkan pemahaman akan siklus akuntansi sehingga dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa, perangkat desa dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2) Perangkat desa hendaknya dapat meningkatkan produktifitas dalam bekerja, sehingga dalam pembuatan laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan dana dapat secara tepat waktu atau sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
3) Perangkat desa hendaknya dapat lebih meningkatkan rasa tanggungjawab akan kegiatan yang masih harus dilakukan dalam pemerintahan desa demi mencapai kesejahteraan masyarakat, sehingga perangkat desa akan lebih memaksimalkan kinerjanya dalam mengelola dana desa.
4) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen dan memilih mediator dengan variabel lain yang dapat memediasi secara signifikan pengaruh variabel-variabel independen terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adi Rukminto, Isbandi. 2007.*"Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat",* Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.

Adisasmita, Raharjo. 2006. *"Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*", Yogyakarta : Graha Ilmu.

Adisasmita, Raharjo. 2011. *"Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*" Yogyakarta: Graha Ilmu.

Ajija, Shochrul Rohmatul, dkk. 2011. *"Cara Cerdas Menguasai Eviews*". Jakarta: Salemba Empat.

Alain, Mitrani. 1995. *"Manajemen Sumber Daya Manusia Berdasarkan Kompetensi"*. Jakarta: Intermasa.

Arikunto, Suharsimi. 1998. "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek"*. Jakarta: Rineka Cipta.

Aziz,Abdul. 2010.*" Manajemen Investasi Syariah",* Bandung : Alfabeta.

Basrowi dan Suwandi. 2008. *"Memahami Penelitian Kualitatif*", Jakarta. Akademia Pressindo

Block,Petez. 1999."*Stewardship (Sikap Melayani), A.B, Clara Suwondo*". Interaksa Batam Centre.

Bungin, Burhan. 2006. *"Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya"*. Jakarta: Kencana.

Dessler, Gary. 2007."*Human Resource Management"*. England: Pearson Education Limited, Inc.

Edison, Emron, Yohny Anwar dan Imas Komariyah.*2017 "Manajemen Sumber Daya Manusia"*.Bandung : Alfabeta.

Ghozali, Imam. 2016. *"Aplikasi Analisis Multivarietive dengan program IBM SPSS 23"*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Kunandar. 2007. *"Guru Profesional : Imlementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam sertifikasi guru"*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.

Loina Lalolo Krina. 2003. *"Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi. Sekretariat Good Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional"*.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Pablik.* Yogyakarta: CV Andi Offset

Mujiman Haris. 2011 "*Manajemen Pelatihan Berbasis Belajar Mandiri"*. (Yogyakarta : Pustaka Belajar). .

Nur Indriantoro dkk. 2018. *"Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen"*, (Yogyakarta : ANDI & BPFE.

Nyoman, Rudana. 2005. *"Pengaruh kompetensi dan komunikasi interpersonal terhadap kualitas pelayanan public"*. Jakarta : STIA LAN.

Rahmadi. 2011. *"Pengantar Metodologi Penelitian"*. Banjarmasin: Antasari.

Sanjaya, Wina 2005. *"Perencanaan dan Sistem Pembelajaran*". Jakarta : Kencana, 2005.

Sinclair, A. 1995. *"The Chameleon of Accountability : Forms and Discources.*

Sugiyono. Metodologi Penelitian Kuantitatif dan R&D". Bandung: Alphabet.

UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa

Zunaida, Hayat Daris. 2018.*" Kemandirian Desa"*. Malang:CV. Cita Intrans Se

Jurnal:

Daniel Aditya Utama dan Rediana Setiayani. 2014. *"Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Responsibilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah Terhadap Kinerja Guru*". Vol, 9.No, 2.100-114.

Indonesian Journal of Cultural and Comunity Development Vol 10 (2021

Kadek Nurdamasih, Anantawikrama Tungga Atmadja, I Putu Julianto. 2019. *"Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sistem Pemberian Kredit Mutranin Pada Dadia tangkas Kori Agung Desa Pakraman Bila Bajang, Kecamatan Kubutambahan".* Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi. Vol,10. No, 1. 208-2017

Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Kebijakan Umum Dana Desa. 2015 (Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 dan PP No.60 Tahun 2014).

LAMPIRAN

Lampiran 1

Tabulasi Data Penelitian Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

A. Akuntabilitas Dana Desa(Y)

No.	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)						Total
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	
1.	5	4	5	4	5	5	28
2.	5	5	5	5	5	5	30
3.	5	4	4	4	4	4	25
4.	4	2	5	4	5	3	23
5.	5	5	5	5	5	5	30
6.	4	4	4	4	5	4	25
7.	5	5	5	5	5	4	29
8.	5	3	5	5	5	5	28
9.	5	5	5	4	5	4	28
10.	5	3	5	5	5	5	28
11.	4	4	5	4	4	4	25
12.	5	5	4	5	5	4	28
13.	5	4	4	5	4	4	26
14.	4	4	5	4	5	4	26
15.	5	4	5	4	5	4	27
16.	4	4	4	4	5	5	26
17.	5	5	5	5	5	5	30
18.	5	4	5	4	5	2	25
19.	5	5	5	5	5	5	30
20.	5	5	5	5	5	5	30
21.	5	4	4	5	5	4	27
22.	5	3	5	4	5	3	25
23.	4	5	5	5	5	5	29
24.	5	5	5	5	5	5	30
25.	5	5	5	5	4	4	28
26.	5	3	5	4	5	3	25
27.	5	5	5	5	5	5	30
28.	4	3	5	4	5	3	24
29.	5	5	5	5	5	5	30
30.	5	4	5	5	5	5	29
31.	4	4	5	4	4	3	24
32.	5	5	5	5	5	4	29

33.	4	3	5	3	5	3	23
34.	5	4	5	4	4	5	27
35.	5	5	5	5	5	5	30
36.	4	4	5	5	5	5	28
37.	5	5	5	3	5	5	28
38.	5	4	5	5	5	5	29
39.	5	4	5	4	5	5	28
40.	5	4	5	4	5	4	27
41.	5	4	5	5	5	4	28
42.	5	4	5	4	5	4	27
43.	5	5	5	5	5	5	30
44.	5	5	4	4	4	4	26
45.	5	5	5	5	5	5	30
46.	5	5	5	5	5	5	30
47.	5	4	5	3	5	4	26

B. Kompetensi Perangkat Desa X1

No.	Kompetensi Perangkat Desa X1							Total
	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	
1.	5	5	5	5	5	2	4	31
2.	4	4	5	4	4	4	4	29
3.	5	5	5	5	5	5	5	35
4.	5	5	4	4	5	5	4	32
5.	5	5	5	5	5	5	5	35
6.	4	4	4	4	4	4	4	28
7.	5	5	5	5	4	4	4	32
8.	4	5	4	5	5	4	4	31
9.	5	5	4	5	5	3	4	31
10.	4	5	4	5	5	4	4	31
11.	4	4	4	4	4	4	4	28
12.	4	5	5	5	4	4	4	31
13.	5	5	5	5	5	4	4	33
14.	4	4	3	3	5	3	4	26
15.	5	5	5	5	5	4	4	33
16.	5	5	5	5	5	4	4	33
17.	5	5	5	5	5	5	5	35
18.	5	5	5	5	4	4	4	32
19.	5	5	5	5	5	4	4	33
20.	5	5	4	4	5	4	4	31
21.	5	5	5	5	5	4	4	33
22.	5	4	5	5	4	4	4	31
23.	5	5	4	4	4	3	4	29
24.	5	5	5	5	5	5	5	35

25.	5	5	5	4	4	4	4	31
26.	5	5	5	5	5	4	5	34
27.	5	5	5	5	5	5	5	35
28.	4	4	3	4	4	4	4	27
29.	5	5	5	5	5	4	5	34
30.	5	5	5	5	5	5	5	35
31.	4	4	5	5	5	4	4	31
32.	5	5	5	4	5	4	4	32
33.	4	5	5	4	5	3	4	30
34.	5	5	5	5	5	5	4	34
35.	5	5	5	5	5	4	5	34
36.	5	5	4	5	5	4	4	32
37.	5	5	4	4	4	4	4	30
38.	5	5	5	4	4	3	4	30
39.	5	5	4	4	5	4	4	31
40.	5	4	5	5	4	4	4	31
41.	5	4	4	4	4	4	4	29
42.	4	4	4	4	4	4	4	28
43.	4	5	5	4	5	3	4	30
44.	4	4	5	4	4	3	4	28
45.	5	5	5	5	5	5	5	35
46.	4	4	5	5	5	5	4	32
47.	4	5	5	5	4	3	4	30

C. Transparansi X2

No.	Transparansi X2							Total
	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20	
1.	4	5	5	5	2	5	5	31
2.	4	4	4	4	4	4	4	28
3.	5	5	5	5	5	5	5	35
4.	4	4	5	4	3	3	5	28
5.	5	5	5	5	5	5	5	35
6.	4	4	4	4	4	4	4	28
7.	4	5	5	5	5	4	5	32
8.	4	4	4	4	4	3	4	27
9.	3	5	5	3	4	3	5	28
10.	4	4	4	4	4	3	4	27
11.	4	5	4	4	4	5	5	31
12.	5	4	5	5	4	3	4	30
13.	5	5	5	4	4	4	5	32
14.	3	4	4	4	5	5	4	31
15.	4	5	5	4	4	4	4	30

16.	4	5	4	4	4	4	4	29
17.	5	5	5	5	5	5	5	35
18.	2	4	4	4	4	5	4	27
19.	5	4	4	4	5	4	4	30
20.	4	5	4	4	4	4	4	29
21.	4	5	5	5	5	4	5	33
22.	4	5	4	4	4	3	4	28
23.	4	4	4	4	5	4	5	30
24.	4	5	5	5	5	5	5	34
25.	4	5	5	4	4	4	4	30
26.	3	4	5	4	4	4	5	29
27.	5	5	5	4	4	4	4	31
28.	3	5	4	5	4	3	5	29
29.	4	5	5	5	4	4	4	31
30.	5	5	4	5	4	4	4	31
31.	4	4	5	4	4	3	4	28
32.	4	5	5	5	5	4	4	32
33.	4	5	5	5	5	4	5	33
34.	4	5	5	4	4	4	5	31
35.	5	5	5	5	5	5	5	35
36.	4	5	5	4	4	5	5	32
37.	4	5	5	4	4	4	4	30
38.	3	4	5	4	4	4	4	28
39.	4	5	5	4	4	4	4	30
40.	4	4	4	4	4	4	4	28
41.	4	4	4	4	4	4	4	28
42.	5	5	5	5	5	5	5	35
43.	4	4	4	4	4	4	4	28
44.	5	5	5	5	4	4	4	32
45.	5	5	5	4	4	4	4	31
46.	4	5	5	5	4	4	4	31
47.	4	4	5	4	3	4	4	28

Lampiran 2

Kuesioner Uji Coba Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

Dimohon dengan hormat Bapak/Ibu untuk mengisi identitas secara lengkap. Setiap pertanyaan diharapkan hanya ada satu jawaban untuk menjamin validitas data.

Identitas Responden

1. Nama : .....
2. Jenis Kelamin : ☐Laki-laki ☐Perempuan
3. Usia : ..... Tahun
4. Tingkat Pendidikan : ☐SD ☐SMP ☐ SMA/SMK/MA
   ☐D3 ☐S1 ☐S2
5. Jabatan : ☐ Kepala Lurah ☐Sekretaris ☐Bendahara
6. Masa Kerja : ☐ 5-10 Tahun ☐>10 Tahun
7. Nama Kelurahan : .....

Petunjuk Pengisian

Berikut ini merupakan pernyataan yang mewakili pendapat-pendapat umum mengenai kondisi di Pemerintah Desa Bapak/Ibu/Sdr/I untuk mengetahui seberapa jauh Bapak/Ibu/Sdr/I sangat setujui, setujui,netral/ragu-ragu,tidak setuju, atau sangat tidak setuju terhadap pertanyaan tersebut, dengan member tanda *checklist*(√) pada pilihan yang tersedia sebagai berikut:

Penilaian:

SS = Sangat setuju

S = Setuju

N = Netral

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

No.	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
AKUNTABILITAS						
1.	Ada penyusunan anggaran dana desa					
2.	Penyusunan anggaran dana desa melibatkan masyarakat					
3.	Pelaksanaan dana desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan					
4.	Ada partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dana desa					
5.	Ada laporan keuangan desa sebagai bentuk pertanggungjawaban dana desa					
6.	Masyarakat dapat mengakses laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa					
KOMPETENSI PERANGKAT DESA						
7.	Perangkat desa mengetahui peraturan tentang pengelolaan dana desa					
8.	Pengetahuan akan teknologi dan informasi menunjang kemampuan perangat desa dalam bekerja					
9.	Kemampuan dalam mengelola dana desa harus dimiliki oleh setiap perangkat desa					
10.	Perangkat desa mampu mengalokasikan dana desa sesuai dengan kebutuhan					
11.	Perangkat desa bertanggung jawab dalam pengelolaan dana desa					
12.	Perangkat desa merasa bangga menjadi bagian dari organisasi ini					
13.	Perangkat desa merasa masih ada tanggungjawab yang					

	harus dilakukan di organisasi ini					
TRANSPARANSI						
14.	Pemerintah desa menyediakan akses informasi tentang penggunaan dana desa kepada masyarakat					
15.	Musyawarah perencanaan pembangunan melibatkan masyarakat desa					
16.	Musrenbang dapat meningkatkan kebijakan transparansi anggaran					
17.	Pengumuman pengelolaan anggaran kepada masyarakat dapat meningatkan transparansi					
18.	Pengelolaan dana desa dapat diketahui oleh masyarakat					
19.	Dokumen dana desa dapat diakses dengan mudah					
20.	Dokumen pengelolaan dana desa sesuai dengan yang sebenarnya					

Lampiran 4

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	Total X1
X1.1	Pearson Correlation	1	,541**	,290*	,337*	,245	,267	,356*	,639**
	Sig. (2-tailed)		,000	,048	,020	,098	,070	,014	,000
	N	47	47	47	47	47	47	47	47
X1.2	Pearson Correlation	,541**	1	,318*	,380**	,473**	,071	,304*	,630**
	Sig. (2-tailed)	,000		,030	,008	,001	,634	,037	,000
	N	47	47	47	47	47	47	47	47
X1.3	Pearson Correlation	,290*	,318*	1	,578**	,146	,166	,335*	,628**
	Sig. (2-tailed)	,048	,030		,000	,328	,265	,022	,000
	N	47	47	47	47	47	47	47	47
X1.4	Pearson Correlation	,337*	,380**	,578**	1	,343*	,351*	,395**	,749**
	Sig. (2-tailed)	,020	,008	,000		,018	,016	,006	,000
	N	47	47	47	47	47	47	47	47
X1.5	Pearson Correlation	,245	,473**	,146	,343*	1	,259	,391**	,601**
	Sig. (2-tailed)	,098	,001	,328	,018		,079	,007	,000
	N	47	47	47	47	47	47	47	47
X1.6	Pearson Correlation	,267	,071	,166	,351*	,259	1	,532**	,627**
	Sig. (2-tailed)	,070	,634	,265	,016	,079		,000	,000
	N	47	47	47	47	47	47	47	47
X1.7	Pearson Correlation	,356*	,304*	,335*	,395**	,391**	,532**	1	,711**
	Sig. (2-tailed)	,014	,037	,022	,006	,007	,000		,000
	N	47	47	47	47	47	47	47	47
Total X1	Pearson Correlation	,639**	,630**	,628**	,749**	,601**	,627**	,711**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	47	47	47	47	47	47	47	47

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	Total X1
X2.1	Pearson Correlation	1	,323*	,256	,393**	,215	,137	,064	,567**
	Sig. (2-tailed)		,027	,083	,006	,147	,360	,668	,000
	N	47	47	47	47	47	47	47	47
X2.2	Pearson Correlation	,323*	1	,447**	,410**	,165	,286	,349*	,644**
	Sig. (2-tailed)	,027		,002	,004	,269	,051	,016	,000
	N	47	47	47	47	47	47	47	47
X2.3	Pearson Correlation	,256	,447**	1	,324*	,019	,146	,349*	,530**
	Sig. (2-tailed)	,083	,002		,026	,901	,328	,016	,000
	N	47	47	47	47	47	47	47	47
X2.4	Pearson Correlation	,393**	,410**	,324*	1	,335*	,324*	,296*	,698**
	Sig. (2-tailed)	,006	,004	,026		,021	,026	,043	,000
	N	47	47	47	47	47	47	47	47
X2.5	Pearson Correlation	,215	,165	,019	,335*	1	,301*	,240	,578**
	Sig. (2-tailed)	,147	,269	,901	,021		,040	,104	,000
	N	47	47	47	47	47	47	47	47
X2.6	Pearson Correlation	,137	,286	,146	,324*	,301*	1	,328*	,646**
	Sig. (2-tailed)	,360	,051	,328	,026	,040		,024	,000
	N	47	47	47	47	47	47	47	47
X2.7	Pearson Correlation	,064	,349*	,349*	,296*	,240	,328*	1	,564**
	Sig. (2-tailed)	,668	,016	,016	,043	,104	,024		,000
	N	47	47	47	47	47	47	47	47
Total X1	Pearson Correlation	,567**	,644**	,530**	,698**	,578**	,646**	,564**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	47	47	47	47	47	47	47	47

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Total Y
Y.1	Pearson Correlation	1	,241	,075	,312*	,075	,281	,523**
	Sig. (2-tailed)		,102	,618	,033	,618	,055	,000
	N	47	47	47	47	47	47	47
Y.2	Pearson Correlation	,241	1	,020	,402**	,020	,408**	,687**
	Sig. (2-tailed)	,102		,892	,005	,892	,004	,000
	N	47	47	47	47	47	47	47
Y.3	Pearson Correlation	,075	,020	1	,027	,329*	,095	,306*
	Sig. (2-tailed)	,618	,892		,857	,024	,524	,036
	N	47	47	47	47	47	47	47
Y.4	Pearson Correlation	,312*	,402**	,027	1	,124	,491**	,731**
	Sig. (2-tailed)	,033	,005	,857		,405	,000	,000
	N	47	47	47	47	47	47	47
Y.5	Pearson Correlation	,075	,020	,329*	,124	1	,172	,366*
	Sig. (2-tailed)	,618	,892	,024	,405		,247	,011
	N	47	47	47	47	47	47	47
Y.6	Pearson Correlation	,281	,408**	,095	,491**	,172	1	,789**
	Sig. (2-tailed)	,055	,004	,524	,000	,247		,000
	N	47	47	47	47	47	47	47
Total Y	Pearson Correlation	,523**	,687**	,306*	,731**	,366*	,789**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,036	,000	,011	,000	
	N	47	47	47	47	47	47	47

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,388[a]	,151	,112	1,891

a. Predictors: (Constant), Transparansi, Kompetensi

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	27,902	2	13,951	3,900	,028[b]
	Residual	157,417	44	3,578		
	Total	185,319	46			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

b. Predictors: (Constant), Transparansi, Kompetensi

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	16,399	4,412		3,717	,001
	Kompetensi	,309	,128	,363	2,409	,020
	Transparansi	,048	,128	,057	,377	,708

a. Dependent Variable: Akuntabilitas